



# **RANWAL RENSTRA DINSOSP3AKB TAHUN 2025-2030**

Jalan Sutan Syahrir No.54

Email : [dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id](mailto:dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id)

Website : [www.Dinsosp3akb.sanggau.go.id](http://www.Dinsosp3akb.sanggau.go.id) Kode Pos : 78512

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenan-Nya Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 dapat disusun dan diselesaikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030. Pada prinsipnya Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2030 ini merupakan Dokumen Acuan Operasional pelaksanaan kegiatan Tahun 2025-2030 yang dalam penyusunannya berdasarkan hasil RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 dan dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh Unit-unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 merupakan pelaksanaan teknis selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami Renstra ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya Semoga Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2030 ini dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau **“Pelayanan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan, Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menuju Keluarga yang Sejahtera”**.

Sanggau, 16 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sanggau

**VALENTINUS SUDARTO, S.Sos, M.Si**

Pembina

NIP. 19840402 200604 1 004

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	3
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU</b>	
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau .....	10
2.1.1    Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau .....	10
2.1.2    Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	13
2.2    Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	21
2.2.1    Sumber Daya Manusia (Pegawai).....	21
2.2.2    Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja (Aset) .....	23
2.3    Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	25
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.</b>	
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau .....	50
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	57
3.3    Telaahan Renstra Sosial/BKKBN, Kementerian PPPA dan Renstra DINSOSP3AKB Provinsi Kalimantan Barat .....	58
3.4    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) .....	59



3.5	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.....	59
3.6	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	60
3.6.1	Penentuan Isu – Isu Strategis .....	60
3.6.2	Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana .....	62
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>78</b>
4.1	Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau .....	
4.1.1.	Tujuan Jangka Menengah DINSOSP3AKB.....	78
4.1.2.	Sasaran Jangka Menengah DINSOSP3AKB.....	78
4.1.3.	Indikator .....	78
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB...</b>	<b>83</b>
5.1	Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau .....	83
5.1.1	Strategi jangka menengah Dinas Sosial, Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana .....	83
5.2	Arah Kebijakan jangka menang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kebijakan.....	84
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.....</b>	<b>88</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>125</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>138</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

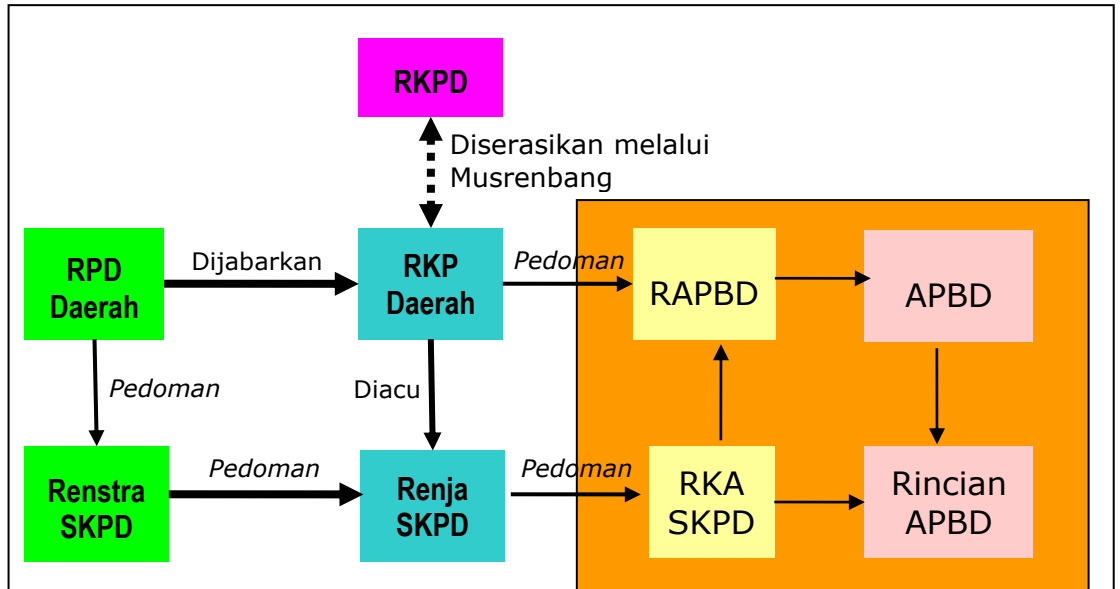
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebagai salah satu organisasi pemerintah dan perangkat daerah perlu terus menerus mengembangkan, meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat serta diharapkan mampu untuk menjalankan roda pemerintahan terutama dalam hal pembiayaan dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan melalui beberapa tahapan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi, diharapkan mampu mensinergikan harapan-harapan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dapat terwujudnya kinerja pemerintah dan kelembagaan daerah yang semakin baik serta tercapainya sasaran dan target pembangunan yang diinginkan. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan Renstra DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah

*Gambar 1 : Alur Pikir dalam Penyusunan Renstra*

Alur Pikir integrasi Renstra Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2029 dengan proses penganggaran adalah sebagai berikut :



RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan Renstra Dinsosp3akb Kab.Sanggau. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok RPJMD.

RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025-2029. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menjadi acuan untuk penyusunan RKA-DINSOSP3AKB (Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana). Muatan RKA meliputi

input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Adapun *critical point* dari susunan ini adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Untuk tahun 2025-2029 Renstra disusun selama lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada DINSOSP3AKB, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja DINSOSP3AKB.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam menyusun Renstra DINSOSP3AKB Kab. Sanggau mengacu pada peraturan per Undang-undangan yang berlaku yaitu :  
1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD '45, serta 3) Landasan operasional :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); lembar
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Permendagri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 – 2029 adalah menjabarkan tujuan, sasaran strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 yang menjadi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJPD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

### **1.3.2. Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunnya Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan tujuan dan sasaran Dinas Sosial P3AKB 2025-2029 dan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu dua tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat sebagai DinsosP3AKB.
3. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Dalam Penulisan Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 terdiri dari :

### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1 Maksud
  - 1.3.2 Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Sosial P3AKB**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
  - 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

	Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
2.1.2	Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
2.2	Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
<b>Bab III</b>	<b>Permasalahan dan isu-isu Strategis DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih
3.3	Telaahan Renstra Perangkat Daerah
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis
<b>Bab IV</b>	<b>Tujuan dan Sasaran</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
4.2	Cascading Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikator masing-masing.
<b>Bab V</b>	<b>Strategi dan Arah Kebijakan</b>
5.1	Strategi Jangka Menengah DINSOSP3AKB
5.2	Arah Kebijakan DINSOSP3AKB
<b>Bab VI</b>	<b>Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan</b>
<b>Bab VII</b>	<b>Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan</b>
<b>Bab VIII</b>	<b>Penutup</b>
	<b>Lampiran</b>

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SANGGAU**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

**2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, adalah sebagai berikut :

**A. Kepala Dinas**

**B. Sekretaris**

Sekretaris membawahi 3 ( tiga ) sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

**C. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**D. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**E. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**F. Bidang Perlindungan Anak Dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

**G. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

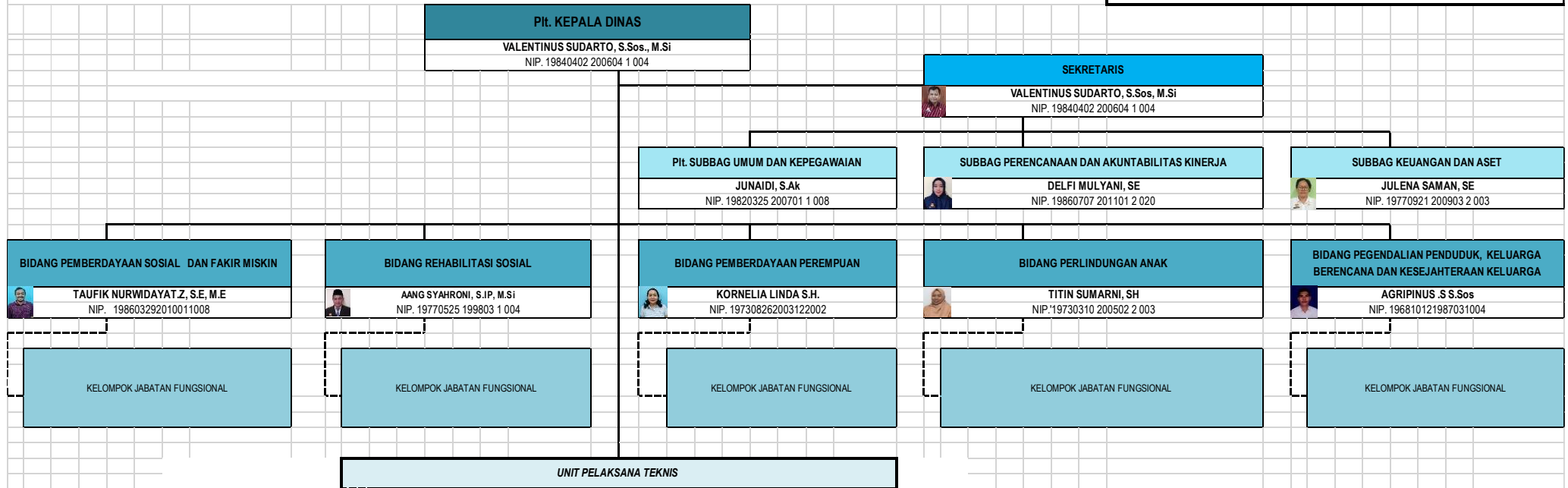
**H. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas**

**I. JabatanFungsional**



**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN SANGGAU**

<b>PERATURAN BUPATI SANGGAU</b>			
<b>NOMOR</b>	:	79 TAHUN 2021	
<b>TANGGAL</b>	:	14 November 2021	
<b>TENTANG</b>	:	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	



Pit. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN SANGGAU,

**VALENTINUS SUDARTO, S.Sos., M.Si**  
Pembina / IV a  
NIP. 19840402 200604 1 004

### **2.1.2 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi :

#### **1. Kepala Dinas**

Sesuai pasal 19 Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas bantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas atas penyelenggaraan urusan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
4. Pelaksanaan administrasi dilingkup Dinas,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- c. Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau,
- d. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- e. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,
- f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana,

- g. Pengelolaan kepegawaian dilingkungan Dinas,
- h. Pengelolaan data dan informasi dilingkungan Dinas,
- i. Pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas,
- j. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Dinas,
- k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas,
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **3. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

- m. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- n. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- o. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,

- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- q. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
- r. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial**

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,



- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial meliputi penanganan warga migran korban tindak kekerasan, orang terlantar, rehabilitasi sosial dan bantuan sosial,
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **5. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan

Dalam melaksanakan tugas Bidang pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam

- mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan perempuan meliputi peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan hak perempuan,
  - f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan,
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **6. Bidang Perlindungan Anak**

Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi

- advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga meliputi advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan ketahanan serta kesejahteraan keluarga,
  - f. Pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga,
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **7. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- c. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi

- pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
  - e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, penggerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
  - f. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **8. Upt Dinas**

UPT Dinas bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

## **9. Jabatan Fungsional**

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

## **2.2 Sumber Daya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai dan Tenaga Kontrak)**

Komposisi sumber daya aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang menduduki jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau No 79 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah : 1 (satu) orang eselon IIb yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang eselon IIIa yaitu sekretaris, 5 (Lima) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang, serta 10 (Sebelas Jabatan Fungsional yang sudah di setarakan ) dan 2 Struktural.

Adapun total jumlah Sumber Daya Manusia atau Tenaga Pegawai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau secara keseluruhan adalah 43 Orang yang meliputi pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil/Fungsional Umum sebanyak 28 orang, serta berstatus Non PNS atau Tenaga Kontrak berjumlah 15 Orang. Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan, oleh sebab itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melalui data tersebut maka diketahui bahwa tenaga Pegawai Negeri Sipil struktural sebanyak 2 orang berstatus Jabatan fungsional Penyetaraan berjumlah 10 yang terdiri dari 9 orang Perempuan atau 90,90 % dan Laki-laki sebanyak 1 orang atau 9,09%. Jika dihitung berdasarkan tingkat golongan maka jumlahnya terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang atau 25 %, golongan III sebanyak 19 orang atau 67,85 % dan sisanya golongan II sebanyak 2 orang atau 7,14 %. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :



**Tabel 2.1**

**Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan Golongan Tahun 2025**

NO	Jenis Kelamin	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	Jumlah
1	Laki-laki	Orang	1 orang	5 orang	3 orang	9 orang
2	Perempuan	-	1 orang	14 orang	4 orang	19 orang
	<b>Total</b>	<b>Orang</b>	<b>2 orang</b>	<b>19 orang</b>	<b>7 orang</b>	<b>28 orang</b>

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Desember 2025 )

Adapun komposisi jumlah pegawai dilihat dari latar belakang pendidikan maka dapat dikatakan bahwa rata-rata pegawai dengan pendidikan akhir sarjana lebih banyak dibandingkan dengan yang pendidikan di bawah Strata 1, dengan latar belakang pendidikan tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Jika dihitung, adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana sebanyak 6 orang atau 21,42 %, Sarjana (Strata 1) sebanyak 16 orang atau 57,14 %, Diploma IV 1 Orang atau 3,57 %, Diploma III sebanyak 2 Orang atau 7,14 %, berpendidikan SLTA sebanyak 4 orang atau 14,28 %, pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 3,57

% serta pendidikan SD sebanyak 0 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No	Jenis Kelamin	SD	SMP	SMA	D1/II	DIII/Akademi	DIV	S1	S2	Jumlah
1	Laki-laki	0	0	2	-	0	0	4	3	9
2	Perempuan	-	1	1	-	2	1	11	3	19
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>28</b>

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Desember 2025)

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No.	Jenis Kelamin		Pendidikan			S2
			SMA	D3	S.1	
1	Laki – Laki	7	5	0	1	1
2	Perempuan	8	3	2	3	
	Total	15	8	2	4	1

(Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB Kab Sanggau Desember 2025)

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja (Asset)

Adapun sarana dan perasarana pendukung kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Sanggau  
Tahun 2025**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor		Bangunan Rusak Ringan	1
2	Kamera		Rusak Ringan	1
3	Brangkas	Baik		2
4	Meja 1 Biro		Rusak	2
5	Meja 1/2 Biro	3 Baik	1 Rusak Ringan	4
			3 Rusak Ringan	3
6	Mesin Ketik Manual		1 Rusak Ringan	1
7	Lemari kayu	8 Baik		8
8	Podium		Rusak Ringan	1
9	Bilboard		Rusak Ringan	1
10	Printer		4 Rusak Ringan	12
		10 Baik		
11	Faximile	Baik		1
12	Telepon		Rusak Ringan	1
13	Sepeda Motor	59 Baik		60
			1 Rusak Berat	
14	Kursi	Baik		3
15	Kursi tamu	Baik		1
16	Kursi Putar	Baik		1
17	Televisi	2 Baik		4
			2 Rusak Berat	
18	Kain Horden	Baik		1
19	Karpet	Baik		1
20	PC. UNIT	6 Baik		16
			10 Rusak Ringan	
21	UPS		3 Rusak Ringan	3
22	Parabola		Rusak Ringan	1
23	Mobil Oprasional ( Mini Bus )	5 Baik		8
			2 Rusak Ringan	
	Truck	1 Baik		
24	Mesin potong rumput	Baik		1
25	Kursi plastik	Baik		1
26	Ac Split	Baik		15
27	Laptop	Baik		10
28	Rak Piring	Baik		1
29	Tempat tidur	Baik		1
30	Kompor Gas	Baik		1
31	Wireles	Baik		1
33	Kipas Angin Walpan	Baik		1

	Kipas Angin Berdiri	Baik		1
34	LCD Proyektor	2 Baik		2
35	Tong Air	Baik		1
36	Mobil Operasional Antar Jemput Akseptor KB	2 Baik		3
			1 Rusak Berat	
37	Mesin Absensi	Baik		
38	Kursi besi/metal	Baik		3
39	Balai Penyuluh KB Kecamatan	Baik		15

(Sumber : Data Subbag Keuangan dan Aset DINSOSP3AKB Kab Sanggau Oktober 2025)

### 2.3 Kinerja Pelayanan DINSOSP3AKB

Gambaran mengenai pencapaian kinerja DINSOSP3AKB dapat diuraikan sebagai berikut.

Berdasarkan gambaran kinerja secara garis besar, hasil pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2020-2024 rata-rata mencapai realisasi 0,48 %.

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) melebihi capaian target kinerja.

Adapun program yang mencapai realisasi 80% adalah program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

serta Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dan kegiatan Program : Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Sedangkan Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau untuk 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan periode Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 :



Tabel 2.3																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana																			
Kabupaten Sanggau																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DINSOSP3AKB	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	11	12	11	12	13	16	17	18	19	20
1.	Rata-Rata Nilai Capaian SKP				80					80					1				
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat				91,84	92	92,8	93	93,80	91,87	91,87				1,00				
3.	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan prima				100	100	100	100	100	100	100				1,00				
4.	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau						60,00	60,50	70,00			69,50	69,72	69,72			1,15	1,15	0,99
5.	Persentase PMKS yang tertangani	%			96,60	97,75	97,45	97,75	97,75	89,06	97, 34	97, 45	97, 45	97, 60	0,92	0,99	1	0,99	0,99
6.	Persentase PMKS Yang difasilitasi	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
7.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%			61,35	61,42	61,54	61,65	61,65	61,78	69,64	69,77	69,77	73,98	1,07	1,13	1,13	1,13	1,2
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%			80,55	80,62	80,74	80,98	80,85	80,55	81,04	81,19	81,19	82,97	1	1,05	1,00	1,00	1,02
9.	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	%			30,10	30,15	30,10	30,15	30,15	18,3	18,3	18,3	18,3	52,98	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
10.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%			17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	20,00	1	1	1	1	1,14
11.	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	%			10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	20,20	25,00	25,00	25,00	25,00	2,02	1,25	1	0,83	0,71
12.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Per 1000 Perempuan			81,55	85,42	89,69	94,18	98,88	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	1,19	1,13	1,08	1,03	0,98
13.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Per 1000 Perempuan			96,21	96,21	96,21	96,21	96,21	97,59	97,06	97,06	97,06	1:1	1,01	1,00	1,00	1,00	1:1
14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%			60,67	60,67	60,67	60,67	60,67	65,84	65,84	65,84	65,84	1:1	1,08	1,08	1,08	1,08	1:1
15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%			38,67	38,67	38,67	38,67	38,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%			2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%			0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,68	0,68	0,68	0,68						
18.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan urban disektor non pertanian	%			0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	1	1	1	1	1
19.	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)				Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Pratama	Madya	Pratama	Madya	Madya					
20.	Laju Pertumbuhan Penduduk				1,32	1,3	1,32	1,3	1,28	1,68	1,08	1,68	1,08	1,28	1,27	0,83	1,27	0,83	1
21.	Total Fertility Rate				2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,21 point	2,21 point	2,21 point	2,21 point	2,21 point	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 20 indikator kinerja pada Renstra lima tahun selama tahun 2020-2024. Dapat dilihat bahwa dari 20 indikator kinerja yang ada hampir semua indikator menunjukkan tingkat capaian kinerja hampir 50 %. Hanya pada indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG masih terbilang rendah hal ini dikarenakan masih banyak perangkat Daerah yang masih belum melaksanakan Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), indikator perangkat tersebut memiliki tingkat capaian yang rendah sehingga pada Penyusunan Renja tahun 2020 telah diadakan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yaitu kegiatan Fasilitasi Pengarusutamaan Gender yang bertujuan untuk mendapatkan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE), karena dari 14 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat baru terdapat 2 Kabupaten Kota yang mendapatkan penghargaan untuk Katergoti Anugrah Parahita Ekapraya (APE).

Pada tahun 2023 Dinsosp3akb mendapatkan Predikat Penghargaan APE Pratama merupakan suatu pencaiapain dalam Indikator ke dua yang masih memiliki tingkat capaian yang rendah yaitu indikator Persentase perempuan di lembaga legislatif. Hal ini dikarenakan masih kurangnya peran aktif perempuan dalam mengisi kedudukan yang ada di lembaga legislative, sehingga peran perempuan sepertinya masih di anggap belum maksimal didalam lembaga legislative di Kabupaten Sanggau. Dari sekian banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di DPRD Kab. Sanggau hanya ada 7 orang perempuan yang menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sanggau.

Untuk Indikator Persentase Jumlah Pekerja Anak di bawah umur sama sekali tidak ada capaian kinerja hal ini di karenakan bahwa di Kabupaten Sanggau sendiri tidak terdapat anak yang bekerja dibawah umur, dari hasil koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sanggau sendiri tidak memiliki wewenang dalam pemberian data pekerja anak dibawah umur.

Indikator Rencana Strategis yang sama yaitu yang tidak memiliki capaian kinerja selama 5 tahun adalah Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar hal ini dikarenakan pada lima tahun terakhir pusat pembelajaran ini masih belum terbentuk dan akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 juga telah dibentuk Tim untuk pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau.

Sedangkan untuk pelayanan yang telah tercapai salah satunya yaitu Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendapat perlindungan hukum. Perempuan dan anak tindak korban kekerasan telah berani melapor kepada aparat penegak hukum melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai sarana dalam memfasilitasi penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan anak, sehingga hampir semua kasus tindak kekerasan yang terjadi dapat ditangani sesuai standar yang ada baik melalui mediasi dan apaarat penegak hukum. Diharapkan dengan adanya keseriusan dari pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindunagn Anak dan Keluarga Berencana dapat menurunkan angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.2																							
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana																							
Kabupaten Sanggau																							
uraian	Anggaran Pada Tahun							Realisasi Anggaran Pada Tahun							Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun							Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Belanja Operasi	13.490.232.828	17.053.336.587	18.438.235.121	21.978.043.544	17.255.620.794			11.320.489.265	14.530.335.701	17.796.564.230	17.096.541.260	0	0	0	1	1	1	1		0	0	0,17	-0,37
Belanja Modal	613.301.000	1.543.434.738	545.111.282	971.783.574	605.798.232			544.181.000	1.493.248.600	454.890.790	965.767.005	-	-	-	1	1	1	1		0	0	0,82	0,79
Belanja Tak Terduga	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0,00
Jumlah	14.103.533.828	18.596.771.325	18.983.346.403	22.949.827.118	17.861.419.026			11.864.670.265	16.023.548.301	18.251.455.020	18.062.308.265	0	0	-	2	2	2	2		0	0	0,19	-0,34

Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja operasi sebesar 0,25% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,19 % pertahun selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2020-2024 sedangkan untuk belanja modal rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 0,12% dan pertumbuhan realisasi belanja modal sebesar 0,07% hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas personil (sumber daya manusia) yang ada di Kecamatan seperti kurangnya tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang telah banyak memasuki masa pensiun sehingga banyak belanja modal yang tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya tenaga lapangan tersebut. Selain kurangnya tenaga PLKB yang telah banyak memasuki masa pensiun, untuk kebutuhan sumber daya manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana juga masih banyak terdapat kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sehingga kurang optimalnya dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk kebutuhan Sumber Daya Manusia sendiri telah diusulkan melalui telaahan staf guna mencukupi kebutuhan pegawai lapangan dan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sanggau.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, maka Pemerintah Kabupaten Sanggau

merencanakan peningkatan pendapatan, baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah. Selain itu, belanja daerah juga diproyeksikan meningkat dengan prediksi anggaran defisit dan menurun setiap tahunnya. Hal ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kebijakan Kabupaten Sanggau di tahun mendatang sebagai berikut:

1. Prinsip *money follow function*, *money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow program*.
2. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mempercepat penyerapan anggaran untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
4. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja.
5. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
6. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Dioptimalkan koordinasi dan sinkronisasi antar-OPD, antara OPD dengan instansi sektoral maupun antara OPD Kabupaten Sanggau dengan OPD Provinsi Kalimantan Barat berkaitan kewenangan dan perkembangan regulasi.
8. Untuk meningkatkan kinerja ASN dan penerapan asas keadilan, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Sanggau akan mengurangi

Belanja Pegawai berupa honorarium pada Belanja Langsung untuk dialihkan ke Tunjangan Kinerja Daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN sehingga berimplikasi pada peningkatan pelayanan publik.

Arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Memanfaatkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dengan perhitungan dan perkiraan yang rasional, dan diharapkan jumlah SILPA akan mengalami penurunan di tahun-tahun mendatang sebagai dampak dari optimalnya penyerapan dan pemanfaatan anggaran.
2. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah guna peningkatan kapasitas usaha Perusahaan Daerah.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Keberhasilan pembangunan merupakan sasaran prioritas atau target kinerja yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi agar dapat diketahui dan ditentukan faktor-faktor yang termasuk dalam kategori; kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sesuai dengan strategi yang akan ditetapkan.

Hasil identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian sasaran dengan menggunakan teknik peta kekuatan (Analisis SWOT), adapun identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

### **A. Analisis Lingkungan Internal, meliputi :**

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan urusan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana lima tahun mendatang.

#### **1. Kekuatan (Strenght)**

Beberapa factor kekuatan yang dapat memberikan dorongan positif demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk adalah sebagai berikut :

- b. Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- c. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan



Keluarga Berencana untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung demi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Sanggau.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Beberapa faktor kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya tenaga professional yang tersedia sehingga pelayanan yang diberikan belum optimal .
- b. Fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pelayanan belum memadai, hal ini berpengaruh terhadap proses pelayanan dan rehabilitasi.

## B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman diluar Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang berpengaruh dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana dalam lima tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut adalah :

### 1. Peluang (Opportunities)

- Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan dan penanganan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.
- Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya susunan

Organisasi Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sebagai landasan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur secara teknis pelaksanaan tugas agar dapat memberikan pelayanan, pemberdayaan dan rehabilitasi kegiatan tersebut.

## 2. Ancaman (Threats)

- ❖ Meningkatnya PMKS di Kabupaten Sanggau , dengan demikian menimbulkan kerentanan akan angka kemiskinan, hal ini merupakan mata rantai kemiskinan yang ada apabila rantai kemiskinan ini tidak diputus.
- ❖ Kabupaten Sanggau merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan sangat rentan terjadinya perdagangan orang serta terjadi perpindahan penduduk dan mata pencaharian untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan PMKS di Kabupaten Sanggau.

## 3. Penyusunan Formulasi Strategi

Penentuan strategi dilakukan dengan menginteraksi faktor0faktor internal dan eksternal melalui analisi SWOT sebagai berikut:

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (SO) adalah:
  - a) Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partisipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  - b) Optimalkan tugas pokok dan fungsi dinas melalui aparatur yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
2. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan

mengatasi ancaman (ST) adalah :

- a) Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
  - b) Memanfaatkan semangat dan motivasi aparaturnya agar dapat diarahkan secara bijaksana untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul dimasyarakat baik masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
3. Strategi mengurangi kelemahan dan memanfaatkan peluang (WO) adalah:
- a) Tingkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat dalam pembangunan.
  - b) Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (WT) adalah :
- a) Tingkatkan Profesionalisme aparaturnya pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja baru serta penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - b) Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.

Tabel 2.7

## Analisis Strategi dengan Faktor SWOT

<p>INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tekad dan semangat seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk berubah dari keadaan sekarang menuju kearah yang lebih baik dalam mencapai kesejahteraan</li> <li>➤ Motivasi yang tinggi dimiliki dari aparatut Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.</li> </ul>	<p>KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Terbatasnya tenaga profesioanal yang tersedia</li> <li>➤ Fasilitasi sarana dan prasarana dibidang pelayan an belum memadai</li> </ul>
<p>PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemitraan antara pemerintah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan berbagai elemen dimasyarakat berjalan baik dan sangat membantu proses pelayanan yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana</li> <li>➤ Memiliki dasar hukum yang kuat atas berdirinya SOTK Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan</li> </ul>	<p>STRATEGI S+O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimalkan tekad dan semangat seluruh komponen yang ada untuk terlibat aktif secara partidipatif dalam membangun mewujudkan kesejahteraan msayarakat.</li> <li>➤ Optimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas melalui aparatut yang ada dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga</li> </ul>	<p>STRATEGI W+O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingkatkan profesionalisme aparatut pemerintah dan mitra kerja peran masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>➤ Memberikan upaya kelengkapan sarana dan prasarana terkait dalam pelayanan penyelenggaraa n kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan</li> </ul>

anak dan keluarga berencana sebagai landasan bekerja sesuai Tugas pokok dan fungsinya.	Berencana .	keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<p>TANGTANGAN (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingginya angka PMKS</li> <li>➤ Kabupaten Sanggau merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.</li> </ul>	<p>STRATEGI S+O</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimalkan tekad dan semangat secara terpadu dan partisipatif bagi pihak pemerintahan daerah masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.</li> <li>➤ Memanfaatkan semangat dan motivasi aparatur untuk memberikan pelayanan dan penanganan yang timbul didalam masyarakat dalam pelayanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>	<p>STRATEGI W+T</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mitra kerja serta peran masyarakat agar mampu dalam penanganan dan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)</li> <li>➤ Lakukan pembangunan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan penanganan dan aksesibilitas terhadap PMKS.</li> </ul>

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Table 3.1  
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
.			
	Urusan Sosial		
1	Belum optimalnya/masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS);	- bahwa upaya yang dilakukan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat (PPKS) belum	- kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak PPKS.

			mencapai hasil yang maksimal..		
2.	Belum optimalnya pendataan dan pemetaan Masyarakat miskin, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti sosial;	-	Belum sinergitas operator Desa dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial	-	Kurangnya kerjasama Operator Desa/Perangkat Desa dengan Pendamping Rehabilitasi Sosial terkait penerima manfaat.
3.	Meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi;	-	Kurangnya kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana	-	Adanya perubahan Iklim dan aktifitas manusia yang dapat merusak alam
4.	Belum optimalnya sarana dan prasarana Shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar;		Shelter ODGJ sudah dibangun awal tahun 2023 namun belum difungsikan hingga saat ini.	-	Tidak Terupdatenya data penerima manfaat sehingga data tidak valid. Ada data yang telah meninggal dan pindah alamat tapi tidak melapor ke perangkat desa/operator desa
5.	Belum Optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; dan	-	Rendahnya Tingkat kepesertaan, belum tepat		Rendahnya tingkat kepesertaan dalam program jaminan sosial, kurangnya

			sasaran dan pendampingan yanag lemah.		pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta tantangan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan.
6.	Belum optimalnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	-	Adanya kesenjangan dalam Upaya perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan ini, terutama dalam konteks pemenuhan hak-hak dasar mereka di luar lingkungan panti .	-	Kurangnya koordinasi antar instansi terkait, terbatasnya anggaran, sumber daya, kurang data dan informasi yang akurat, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1.	Belum optimalnya peran Perempuan dan anak dalam Pembangunan daerah	-	Kurangnya keterlibatan Perempuan dalam sektor ekonomi, termasuk dalam industri dan	-	Kurangnya kesadaran akan pentingnya peran Perempuan dan anak, akses yang terbatas pada Pendidikan dan ekonomi, serta



			kewirausahaan masih rendah.		berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
2.	Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait perlindungan khusus anak;	-	Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait perlindungan khusus anak.	-	Belum optimalnya Sosialisasi kepada Masyarakat terkait perlindungan khusus anak.
3.	Belum optimalnya pemenuhan hak Perempuan dan anak oleh pemerintah daerah;	-	Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai hak-hak Perempuan dan anak.	-	kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya data akurat, koordinasi yang belum optimal antar instansi, serta kurangnya pemahaman dan penerapan kebijakan yang responsif gender dan anak.
4.	Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpilah;	-	kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya data gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan.		Belum optimalnya data Pilah yang ada utk pemanfaatan data Gender dan anak.

5.	Belum semua OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa memahami Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);		Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak masih Belum Maksimal.	-	Belum ada Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
6.	Perencanaan dan penganggaran belum berbasis responsif gender;	-	Pembangunan Responsif Gender Belum Maksimal	-	Belum ada Organisasi Perangkat Daerah / Lembaga Masyarakat yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
7.	Masih lemahnya kemandirian Perempuan di bidang ekonomi;	-	Kurangnya dukungan kebijakan dan Lembaga dalam pemenuhan hak Perempuan dalam bekerja.	-	Diskriminasi Gender dalam pekerjaan dan upah.
8.	Masih banyak kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang	-	Masih Tingginya Angka Kasus Kekerasan Terhadap	-	Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan

	(TPPO)/ Trafficking; dan		Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		
9.	Belum optimalnya penangan terhadap tidak kekerasan terhadap Perempuan dan anak.		Kurangnya kesadaran Masyarakat dalam melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak.		Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	Belum Optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap keluarga;	-	Masih lemahnya koordinasi antar Instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan Data Keluarga	-	Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
2.	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh lapangan keluarga berencana dan kader keluarga Berencana dilapangan serta	-	Belum optimalnya SDM Penyuluh Lapangan keluarga berencana dan kader keluarga	-	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh KB

	Tingkat pemahaman kader tentang tupoksinya;		yang mendapatkan pembinaan.		
3.	Masih rendah akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam Program KB; dan	-	Kurang Partisipasi Akseptor KB Pria	-	Akseptor KB non MKJP masih cukup besar
4.	Belum Optimalnya pembinaan terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga.	-	Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS sdalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah	-	Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan BKL.
		-	Masih lemahnya koordinasi antar Instansi dan lembaga terkait, terutama permintaan data mengenai kependudukan dan Data Keluarga	-	Pemahaman masyarakat tentang kependudukan masih rendah
				-	Masih kurangnya kualitas dan

					kuantitas tenaga penyuluh KB
		-	Kurang Partisipasi Akseptor KB Pria	-	Akseptor KB non MKJP masih cukup besar
		-	Kurangnya partisipasi anggota kelompok UPPKS sdalam melaksanakan program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah	-	Kurangnya fahamnya masyarakat tentang pentingnya kelompok BKB, BKR dan BKL.

### 3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Terpilih.

**Visi Kabupaten Sanggau** adalah Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan.

Sanggau maju berkelanjutan artinya meningkatkan berbagai indicator Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan public yang baik dan pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dandemokratis berbasis elektronik secara berkesinambungan. Sedangkan maju berkeadilan artinya Pemerataan Pembangunan antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang.

**Untuk masa jabatan Bupati Terpilih tahun 2025-2029 memiliki 9 (Sembilan) Misi** yang akan dijalan selama masa jabatan. Adapaun kesembilan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar;
2. Melanjutkan peningkatan perekonomian Masyarakat;

3. Melanjutkan peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia yang unggul;
4. Melestarikan adat budaya dan lingkungan hidup yang bermartabat;
5. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan aparatur sipil negara yang professional;
6. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah;
7. Meningkatkan harmonisasi dan toleransi antar umat beragama;
8. Mewujudkan Pembangunan daerah perbatasan negara yang maju.

### **3.3 Telaahan Renstra Sosial/BKKBN, Kementerian PPPA dan Renstra DINSOSP3AKB Provinsi Kalimantan Barat**

Untuk meningkatkan peran sektor Sosial sebagai penghela pembangunan nasional, Kementerian Sosial pada periode 2015 - 2019 telah menetapkan visi pembangunan sosial, yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong ”**. Target utama penetapan visi pembangunan tersebut adalah untuk mewujudkan Dua sukses pembangunan pertanian, yaitu: 1) Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan Rentan, 2) Sistem penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang profesional. Hal ini menjadi panduan bagi Kementrian Sosial dalam penyusunan rencana strategis ke depan. Dari penjelasan diatas, keterkaitan antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dengan Kementerian terkait (Sosial) sama-sama berperan untuk menurunkan angka kemiskinan dan memiliki arah kebijakan yaitu :

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

### **3.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen pemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional program KKBPK sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran Undang - undang nomor 23 tahun 2014.

### **3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Beencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran OPD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah :

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

### **3.6 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.6.1 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Untuk itu selama 5 (Lima) tahun ke depan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran.

Berdasarkan pada dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, Ada 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Kabupaten Sanggau untuk 5 (Lima) tahun kedepan adalah:

1. Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur dasar;
2. Perbaikan dalam memberikan layanan Pendidikan, Kesehatan dan sosial yang bermutu;
3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan sarana dan prasaranan produksi;
4. Peningkatan pengetahuan, pelatihan dan keterampilan berbasis digital bagi pelaku UMKM dan Generasi muda;
5. Pelestarian adat budaya dan lingkungan yang bermartabat;



6. Peningkatan kerukunan umat beragama;
7. Peningkatan tata Kelola pemerintahan, kesejahteraan dan Profesionalisme ASN;
8. Pengoptimalan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
9. Pembangunan Perbatasan Negara

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota. Maka untuk tahun 2025 terdapat beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Adapun Isu SPM Bidang Sosial tahun 2025 Adalah :

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Graduasi keluarga penerima manfaat bantuan sosial.
3. Pelayanan Pemberdayaan Rehabilitasi

4. Perlindungan dan jaminan sosial
5. Reformasi Birokrasi

### **3.6.2 Isu Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

Ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan penanganan PPKS namun cakupannya masih rendah.
2. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak.
3. Pertumbuhan dan Kesejahteraan penduduk

Seperti telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, diharapkan semua kepentingan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, politik dan ekonomi agar dapat diakomodir dengan fokus untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sanggau yang Maju dan Terdepan.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

##### **4.1.1. Tujuan Jangka Menengah DINSOSP3AKB**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau memiliki 3 tujuan diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender
3. Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan
4. Terwujudnya peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

##### **4.1.2. Sasaran Jangka Menengah DINSOSP3AKB**

1. Meningkatnya Kemandirian PPKS
2. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak
3. Meningkatnya Keberhasilan Ber-KB
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tersebut diatas terdapat indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

##### **4.1.3. Indikator**

##### **1. Indikator tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana :**

1. Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan social (PPKS)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Laju Pertumbuhan Penduduk

4. Nilai SAKIP

**2. Indikator sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

1. Persentase PPKS yang mandiri
2. Indeks pemberdayaan Gender (IDG)
3. Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)
4. Total Fertility Rate
5. Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kab.Sanggau

TABEL 4.2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau		65,00%	70%	70,50%	71,00%
		Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	91,84%	91,27%	92,50%	93%	93, 50 %
2.	Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	10,15	17,50	40,00	45,00	47,25
		Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	7,50	15,00	15,00	20,00	22,50
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,55	80,62	80,74	80,85	80,98
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,35	61,42	61,54	61,65	61,78
			Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya
4.	Terkendalnya Laju Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36	1,34	1,32	1,3	1,28
		Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	Total Fertility Rate	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jika disandingkan dengan tabel 4.1 sebelumnya terlihat bahwa terjadi beberapa perubahan pada tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau

**TABEL 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	70,50%	71,00%
		Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	93%	93,50 %
2.	Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	45,00	47,25
		Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	26,50	26,50
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	80,85	80,98
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,65	61,78
			Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	Nindya
4.	Terkendalinya Laju Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,3	1,28
		Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	Total Fertility Rate	2,21	2,21

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana									
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
1.	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	69,70%	70,00%	70,50%	71,00%	71,50%	71,80%
		Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	90,95%	91,00%	91,50%	92,00%	92,50%	93,00%
2.	Terwujudnya peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	47,25%	47,50%	48,00%	48,50%	49,00%	50,00%
		Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri	30,49	30,55	31,00%	31,50%	32,00%	32,50%
3.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	74,00	74,50	75,00	84,50	85,00	85,50
		Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,50	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50
			Capaian Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	700	701	800	801	900	901
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70	1,60	1,50	1,40	1,20	1,00
		Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	Total Fertility Rate	2,21	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi Dinsosp3akb. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran dan tujuan. Keseluruhan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat dilihat pada Tabel 5.1 pada lampiran tabel.

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau**

##### **5.1.1 Strategi jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas penanganan PPKS
2. Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB

## **5.2. Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan data PPKS terpilah yang valid dan komprehensif
2. Meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial yang akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dari kekerasan dan tidak pidana perdagangan orang
4. Meningkatnya pemenuhan hak anak secara universal serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
5. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta ketersediaan alat pelayanan kontrasepsi
6. Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri.

Berdasarkan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada perumusan tabel 5.2 sebagai berikut :

<b>TABEL 5.2</b>				
<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>				
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Gender	1	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	1 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan diberbagai bidang	1 Peningkatan Kesetaraan Gender (KG) dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan Pelaksanaan, Perencanaan, Responsif Gender (PPRG) dan pendampingan implementasi PPRG
			2. Mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak dengan mendorong partisipasi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa serta pengembangan kelembagaan forum anak.	2. Penyediaan Regulasi, penguatan kelembagaan, sarana prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi kekurangan sesuai dengan hasil Evaluasi KLA
Terkendalnya Laju Penduduk	1.	Meningkatnya Keberhasilan ber-KB	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB	1 Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat.
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS	1	Meningkatnya Kemandirian PPKS	1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar Sosial kepada Masyarakat Miskin	1 Peningkatan kualitas pelayanan dasar sosial kepada masyarakat miskin
<b>TUJUAN</b>		<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	1 Peningkatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	1 Meningkatkan pelaporan akuntabilitas kinerja
	2	Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	2 Peningkatan Kelancaran pelayanan perkantoran	2 Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, serta sarana dan prasarana aparatur DINSOSP3AKB Kab.Sanggau



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab VI ini fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana program dan kegiatan serta pendanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026. Program prioritas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan program prioritas rencana jangka menengah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Program prioritas tersebut selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 untuk dijabarkan ke dalam kegiatan. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau serta berpedoman pada program dan pendanaan indikatif dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sanggau.

Selama dua tahun kedepan, Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau akan menjalankan program-program dalam rangka pemenuhan kepala daerah, sebagai berikut :

#### **Program Dinsosp3akb :**

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
8. Program Perlindungan Perempuan
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Program Perlindungan Khusus Anak
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Karena terjadinya dinamisasi regulasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang semula berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 di Tahun 2020 hanya ada 18 (delapan belas) program dan 60 (Enam Puluh Tiga) kegiatan, di Tahun 2021-2024 berubah menjadi 15 (Lima Belas) program, 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan dan 114 (Seratus Empat Belas) sub kegiatan.

Selanjutnya penjabaran dari semula program, kegiatan menjadi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kerangka pendanaan jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau per sasaran strategis disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra DINSOSP3AKB		Unit Kerja DINSOSP3AKB Penanggung- jawab	Lokasi		
						2025		2026		2027		2028						2029	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP	69,70%	71,00%		71,00%		71,00%		71,00%		71,00%		72,00%		Kadis DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DINSOSP3AKB Kab.Sanggau			Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	69,70%	71,00%		71,00%		71,00%		71,00%		71,00%		72,00%		Kadis DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		1. 06. 01 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indikator Program : Ketersediaan layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	100%	100%	5.768.603.733	100%	6.914.130.416	100%	6.979.763.141	100%	6.996.063.141	100%	7.009.863.141	100%	7.017.105.461	Sekretaris DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		01 06 01 02 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	26 Dokumen	26 Dokumen	43.278.127	26 Dokumen	49.020.660	26 Dokumen	49.020.660	26 Dokumen	49.020.660	26 Dokumen	49.020.660	26 Dokumen	44.671.680		
		1. 06. 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sasaran : Dokumen Perencanaan Dinsosp3akb Kab.Sanggau	11 Dok	11 Dok	16.236.636	7 Dok	9.336.060	11 Dok	9.336.060	7 Dok	9.336.060	7 Dok	9.336.060	7 Dok	9.336.060	Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tingkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		1. 06. 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sasaran : Dokumen RKA Dinsosp3akb Kab.Sanggau	2 Dok	2 Dok	3.761.192	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
		1. 06. 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sasaran : Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dinsosp3akb Kab. Sanggau	2 Dok	2 Dok	3.761.523	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	2 Dok	6.980.160	Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		1 Dok	
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen RKA-SKPD															

		1. 06. 01 2 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sasaran : DPA Dinsosp3akb Kab.Sanggau	1 Dok	1 Dok	3.499.331	1 Dok	5.111.040	1 Dok	5.111.040	1 Dok	5.111.040	1 Dok	5.111.040	1 Dok	5.111.040	Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
				Indikator Hasil :Tingkat Pemenuhan Dokumen DPA-SKPD										100%					
		1. 06. 01 2 01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sasaran : Perubahan DPA Dinsosp3akb Kab.Sanggau	1 Dok	1 Dok	3.479.795	1 Dok	4.348.980	1 Dok	4.348.980	1 Dok	4.348.980	1 Dok	4.348.980	1 Dok		Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	100%		100%									# REF!		
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Dokumen Perubahan DPA-SKPD															
		1. 06. 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sasaran : Dokumen LAKIP, RKT, TAPKIN dan Rencana Aksi, SPIP Dinsosp3akb Kab. Sanggau	4 Laporan	2 Laporan	5.529.821	2 Laporan	6.810.330	2 Laporan	6.810.330	2 Laporan	6.810.330	2 Laporan	6.810.330	2 Laporan	6.810.330	Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%			-		
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, SPIP											100%				
		1. 06. 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran : Dokumen LAKIP, RKT, TAPKIN dan Rencana Aksi, SPIP Dinsosp3akb Kab. Sanggau	8 Laporan	4 Laporan	7.009.829	4 Laporan	9.453.930	4 Laporan	9.453.930	4 Laporan	9.453.930	4 Laporan	9.453.930	4 Laporan	9.453.930	Kasubbag Perencanaan Akuntabilitas Kinerja	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tingkat pemenuhan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															



		1. 06. 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di susun dalam satu tahun	30 Dok	30 Dok	4.873.070.527	30 Dok	5.297.759.742	30 Dok	5.341.292.467	30 Dok	5.343.292.467	30 Dok	5.344.292.467	30 Dok	5.344.292.467		
		1. 06. 01 2 02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau	35 Orang	35 Orang	3.117.357.199	42 Orang	3.399.771.578	42 Orang	3.399.771.578	42 Orang	3.399.771.578	42 Orang	3.399.771.578	42 Orang	3.399.771.578	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tingkat Pemenuhan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN															
		1. 06. 01 2 02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sasaran : TPP ASN dan P3K	12 Dok	12 Dok	1.514.849.864	12 Dok	1.649.376.092	12 Dok	1.649.376.092	12 Dok	1.649.376.092	12 Dok	1.649.376.092	12 Dok	1.649.376.092	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tingkat Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN															
		1. 06. 01 2 02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sasaran : Pelaksanaan Verifikasi Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Dok	1 Dok	167.263.947	1 Dok	170.006.045	1 Dok	212.438.912	1 Dok	212.438.912	1 Dok	212.438.912	1 Dok	212.438.912	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%		100%								100%	-		
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															

		1. 06. 01 2 02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Sasaran : Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Dok	1 Dok	54.026.697	1 Dok	54.026.697	1 Dok	55.000.000	1 Dok	57.000.000	1 Dok	58.000.000	1 Dok	58.000.000	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	100%	100%		100%											
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Dokumen Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD															
		1. 06. 01 2 02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sasaran : Laporan Keuangan Akhir tahun Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Lap	1 Lap	2.975.722	1 Lap	5.413.914	1 Lap	5.413.914	1 Lap	5.413.914	1 Lap	5.413.914	1 Lap	5.413.914	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		
				Indikator Hasil : Tingkat Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
		1. 06. 01 2 02 0006	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Tanggapan Pemeriksaan	Sasaran : LHP, Realisasi Fiskal dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Dok	1 Dok	9.789.268	1 Dok	9.789.268	1 Dok	9.789.268	1 Dok	9.789.268	1 Dok	9.789.268	1 Dok	9.789.268	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		
				Indikator Hasil : Tingkat Dokumen Jumlah Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan															
		1. 06. 01 2 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akutansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fiskal dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb	12 Lap	12 Lap	5.081.114	12 Lap	5.935.703	12 Lap	5.935.703	12 Lap	5.935.703	12 Lap	5.935.703	12 Lap	5.935.703	Kasubbag Keuangan dan Aset	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		
				Indikator Hasil : Tingkat Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD											100%				

		1. 06. 01 2 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sasaran : Gaji dan Tunjangan ASN, Tunjangan Kinerja ASN, Pelaksanaan Verifikasi, Pelaksanaan Akuntansi dan SPJ, Laporan Keuangan Akhir tahun, LHP, Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Prognosis realisasi anggaran Dinsosp3akb Kab. Sanggau	2 Dok	2 Dok	1.726.716	2 Dok	3.440.445	2 Dok	3.567.000	2 Dok	3.567.000	2 Dok	3.567.000	2 Dok	3.567.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	-		
				Indikator Hasil : Tingkat Laporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															
		1. 06. 01 2 03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang di susun selama satu tahun</b>	<b>8 Dok</b>	<b>8 Dok</b>	<b>21.564.705</b>	<b>8 Dok</b>	<b>31.615.354</b>	<b>8 Dok</b>	<b>31.815.354</b>	<b>8 Dok</b>	<b>32.315.354</b>	<b>8 Dok</b>	<b>32.815.354</b>	<b>8 Dok</b>	<b>32.815.354</b>		
		1. 06. 01 2 03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	2 Dok	2 Dok	2.187.255	2 Dok	6.280.424	2 Dok	6.280.424	2 Dok	6.280.424	2 Dok	6.280.424	2 Dok	6.280.424	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-		
				Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun															
		1. 06. 01 2 03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	2 Dok	2 Dok	7.020.030	2 Dok	8.534.930	2 Dok	8.534.930	2 Dok	8.534.930	2 Dok	8.534.930	2 Dok	8.534.930	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-		
				Indikator Hasil : Tersedianya Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah yang disusun															
		1. 06. 01 2 03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	3 Lap	3 Lap	12.357.420	3 Lap	16.800.000	3 Lap	17.000.000	3 Lap	17.500.000	3 Lap	18.000.000	3 Lap	18.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-		
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		1. 06. 01 2 05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun selama satu tahun</b>	<b>8 Dok</b>	<b>8 Dok</b>	<b>16.331.030</b>	<b>8 Dok</b>	<b>148.568.016</b>	<b>8 Dok</b>	<b>149.068.016</b>	<b>8 Dok</b>	<b>149.168.016</b>	<b>8 Dok</b>	<b>149.268.016</b>	<b>8 Dok</b>	<b>149.368.016</b>	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB</b>	<b>DINSOSP3AKB</b>
		1. 06. 01 2 05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sasaran : Pakaian Dinas Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	63 Stel	-	-	63 Stel	47.223.000	63 Stel	47.223.000	63 Stel	47.223.000	63 Stel	47.223.000	63 Stel	47.223.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-		
				Indikator Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan															

		1 06. 01 2 05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sasaran : ASN dan Tenaga Kontrak Dinsosp3akb Kab.Sanggau	2 Dok	2 Dok	5.134.971	2 Dok	6.621.194	2 Dok	6.621.194	2 Dok	6.621.194	2 Dok	6.621.194	2 Dok	6.621.194	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-		
				Indikator Hasil : Tersedianya laporan administrasi kepegawaian yang disusun															
		1 06. 01 2 05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Status CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	2 Dok	2 Dok	6.621.194	2 Dok	6.296.060	2 Dok	6.296.060	2 Dok	6.296.060	2 Dok	6.296.060	2 Dok	6.296.060	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%	-		
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian															
		1 06. 01 2 05 0005	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Status CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	1 Dok	1 Dok	4.574.865	1 Dok	4.651.762	1 Dok	4.651.762	1 Dok	4.651.762	1 Dok	4.651.762	1 Dok	4.651.762	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												80%			
		1 06. 01 2 05 0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Status CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	16 Orang	16 Orang	-	16 Orang	77.776.000	16 Orang	77.776.000	16 Orang	77.776.000	16 Orang	77.776.000	16 Orang	77.776.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan												80%			

		1 06. 01 2 05 0010	Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sasaran : Pakaian Dinas, DUK, Usulan kenaikan pangkat, usulan KGB, Usulan Pemetaan, Forjab, Usulan Perubahan Status CPNS ke PNS, usulan Satyalencana, usulan Ujian Dinas, Usulan Penyesuaian ijazah, Usulan BUP, Laporan Profil ASN, laporan Mengikuti Sosialisasi dan Laporan Mengikuti Bimtek Dinsosp3akb Kabupaten Sanggau	35 Orang	35 Orang	-	35 Orang	6.000.000	35 Orang	6.500.000	35 Orang	6.600.000	35 Orang	6.700.000	35 Orang	6.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															
		1 06. 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	100%	100%	235.337.441	100%	334.301.141	100%	341.701.141	100%	344.401.141	100%	344.601.141	100%	345.701.141		
		1 06. 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	5 Paket	5 Paket	9.343.980	5 Paket	9.500.000	5 Paket	9.500.000	5 Paket	10.000.000	5 Paket	10.000.000	5 Paket	10.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Komponen Instalasi															
		1 06. 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	12 Paket	12 Paket	30.913.500	12 Paket	45.431.980	12 Paket	46.431.980	12 Paket	47.431.980	12 Paket	47.431.980	12 Paket	47.431.980	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											80%				
		1 06. 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	8 Paket	8 Paket	28.535.658	8 Paket	31.000.000	8 Paket	32.000.000	8 Paket	33.000.000	8 Paket	33.000.000	8 Paket	34.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan											80%				

		1 06. 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinasop3akb Kab. Sanggau	1.095 Dok	1.095 Dok	6.603.490	1.095 Dok	9.088.000	1.095 Dok	9.088.000	1.095 Dok	9.088.000	1.095 Dok	9.088.000	1.095 Dok	9.088.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan															
		1 06. 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinasop3akb Kab. Sanggau	12 Paket	12 Paket	24.115.000	12 Paket	24.500.000	12 Paket	24.600.000	12 Paket	24.700.000	12 Paket	24.800.000	12 Paket	24.800.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Paket bahan Material disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket bahan Material disediakan															
		1 06. 01 2 06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinasop3akb Kab. Sanggau	12 Lap	12 Lap	1.298.700	12 Lap	6.000.000	12 Lap	6.000.000	12 Lap	6.000.000	12 Lap	6.000.000	12 Lap	6.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu															
		1 06. 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinasop3akb Kab. Sanggau	192 OH	192 OH	120.381.000	192 OH	195.000.000	192 OH	200.000.000	192 OH	200.000.000	192 OH	200.000.000	192 OH	200.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		1 06. 01 2 06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinasop3akb Kab. Sanggau	5 Dok	5 Dok	8.570.199	5 Dok	8.570.199	5 Dok	8.570.199	5 Dok	8.570.199	5 Dok	8.570.199	5 Dok	8.570.199	Kasubag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	6.822.243		
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															

		1 06 '01 2 '06 '0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Dok	1 Dok	5.575.914	1 Dok	5.210.962	1 Dok	5.510.962	1 Dok	5.610.962	1 Dok	5.710.962	1 Dok	5.810.962	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
		1 06 '01 2 '07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	100%	-	100%	333.800.000	100%	343.800.000	100%	353.800.000	100%	363.800.000	100%	373.800.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		1 06 '01 2 '07 '0002	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Sasaran : Kendaraan Operasional/Jabatan Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	163.800.000	1 Unit	163.800.000	1 Unit	163.800.000	1 Unit	163.800.000	1 Unit	163.800.000		
				Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan															
		1 06 '01 2 '07 '0005	Pengadaan Mebel	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	9 Unit	9 Unit	-	9 Unit	120.000.000	9 Unit	120.000.000	9 Unit	120.000.000	9 Unit	120.000.000	9 Unit	120.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Paket Mebel yang Disediakan															
		1 06 '01 2 '07 '0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	9 Unit	9 Unit	-	9 Unit	50.000.000	9 Unit	60.000.000	9 Unit	70.000.000	9 Unit	80.000.000	9 Unit	90.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan															
		1 06 '01 2 '08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	298.686.760	100%	301.686.760	100%	305.686.760	100%	306.686.760	100%	308.686.760	100%	309.078.060	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		1 06 '01 2 '08 '0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	256 Lap	256 Lap	2.472.000	256 Lap	2.472.000	256 Lap	2.472.000	256 Lap	2.472.000	256 Lap	2.472.000	256 Lap	2.472.000		
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya benda pos yang disediakan untuk surat menyurat															
		1 06 '01 2 '08 '0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	12 Laporan	12 Laporan	172.608.700	12 Laporan	175.608.700	12 Laporan	177.608.700	12 Laporan	178.608.700	12 Laporan	179.608.700	12 Laporan	180.000.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															

		1 06. 01 2 08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	12 Lap	12 Lap	123.606.060	12 Lap	123.606.060	12 Lap	125.606.060	12 Lap	125.606.060	12 Lap	126.606.060	12 Lap	126.606.060	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
		1 06. 01 2 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang di Pelihara</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>280.335.143</b>	<b>100%</b>	<b>417.378.743</b>	<b>100%</b>	<b>417.378.743</b>	<b>100%</b>	<b>417.378.743</b>	<b>100%</b>	<b>417.378.743</b>	<b>100%</b>	<b>417.378.743</b>	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		1 06. 01 2 09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	10 Unit	10 Unit	158.791.200	10 Unit	287.594.800	10 Unit	287.594.800	10 Unit	287.594.800	10 Unit	287.594.800	10 Unit	287.594.800		
				Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															
		1 06. 01 2 09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	40 Unit	40 Unit	21.360.000	40 Unit	29.600.000	40 Unit	29.600.000	40 Unit	29.600.000	40 Unit	29.600.000	40 Unit	29.600.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara															
		1 06. 01 2 09 0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sasaran : Layanan administrasi umum Dinsosp3akb Kab. Sanggau	1 Unit	1 Unit	100.183.943	1 Unit	100.183.943	1 Unit	100.183.943	1 Unit	100.183.943	1 Unit	100.183.943	1 Unit	100.183.943	Kasubbag Umum dan Kepegawaian DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersedianya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												80%			



Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)														Kadis DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
Meningkatnya Kemandirian PPKS				Persentase PPKS yang mandiri	25,00	25,00		26,50								26,50		Kadis DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		1 '06 '02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Indikator Program : Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembiayaan	100%	100%	94.117.540	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	212.981.516	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		1 '06 '02'2 '03	Pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang mendapat pengembangan kapasitas	100%	100%	94.117.540	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	215.000.000	100%	212.981.516		
		1 06 02 2 03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	67.332.785	-		-		-		-		-	-	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1 06 02 2 03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Masyarakat Kabupaten/Kota	Sasaran : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4 Lembaga	4 Lembaga	26.784.755	4 Lembaga	150.000.000	4 Lembaga	150.000.000	4 Lembaga	150.000.000	4 Lembaga	150.000.000	4 Lembaga	147.981.516	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1 06 02 2 03 0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Sasaran : Pengenalan, Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	100 Orang	-	100 Orang	60.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	65.000.000	100 Orang	65.000.000	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial															
				Indikator Hasil : Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial															

		1. 06. '03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Indikator Program : Persentase Warga Negara Migran yang mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah asal	100%	100%	24.876.805	100%	31.420.076	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%		Kabid REHSOS	DINSOSP3AKB
		1. 06. '03'2 '01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk pemulangan ke Desa /	Indikator Kegiatan : Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi yang dipulangkan ke daerah asalnya.	100%	100%	24.876.805	100%	31.420.076	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	32.000.000	100%	60.783.398	Kabid REHSOS	DINSOSP3AKB
		1. 06. '03'2 '01 '0001	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kehurahan Asal	Sasaran : Warga Migran	200 Orang	200 Orang	24.876.805	200 Orang	31.420.076	200 Orang	32.000.000	200 Orang	32.000.000	200 Orang	32.000.000	200 Orang	60.783.398	32.000.000	
				Indikator Kehasilan : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kehurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarisasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa / Kehurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. '04	Program Rehabilitasi Sosial	Indikator Program : Persentase PPKS yang tertangani	100%	100%	2.507.685.450	100%	2.901.121.956	100%	2.924.942.497	100%	2.929.042.497	100%	2.932.142.497	100%	3.269.504.551	Kabid Rehasos	DINSOSP3AKB
		1. 06. '04'2 '01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Daara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Indikator Kegiatan : Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	2.507.685.450	100%	2.901.121.956	100%	2.924.942.497	100%	2.929.042.497	100%	2.932.142.497	100%	3.269.504.551		
		1. 06. '04'2 '01 '0001	Penyediaan Permakanaan Terlantar	Sasaran : Lanjut Usia Terlantar	250 Orang	250 Orang	19.623.003	250 Orang	25.000.000	250 Orang	26.000.000	250 Orang	27.000.000	250 Orang	28.000.000	250 Orang	367.262.054	Kabid Rehasos	DINSOSP3AKB
				Indikator Kehasilan : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. '04'2 '01 '0002	Penyediaan Sandang Terlantar	Sasaran : Lanjut Usia Terlantar	36 Orang	36 Orang	10.600.000,00	36 Orang	49.999.727	36 Orang	49.999.727	36 Orang	49.999.727	36 Orang	49.999.727	36 Orang	49.999.727	Kabid Rehasos	DINSOSP3AKB
				Indikator Kehasilan : Jumlah Orang yang Menerima Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Menerima Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota															

		1. 06. 04 2 01 0003	Penyediaan Alat Bantu	Sasaran : Penyandang Disabilitas	7 Orang	7 Orang	25.525.700	12 Orang	43.758.342	15 Orang	54.697.928	15 Orang	54.697.928	15 Orang	54.697.928	15 Orang	54.697.928	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0004	Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Sasaran : Penyandang Disabilitas	120 Orang	120 Orang	2.380.000	30 Orang	19.999.993	30 Orang	19.999.993	30 Orang	19.999.993	30 Orang	19.999.993	30 Orang	19.999.993	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0005	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Sasaran : Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar	250 Orang	250 Orang	105.099.909	250 Orang	106.099.909	250 Orang	107.099.909	250 Orang	108.099.909	250 Orang	109.099.909	250 Orang	105.099.909	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.	Sasaran : Penyandang Disabilitas	1000 Orang	1000 Orang	2.128.405.174	1000 Orang	2.191.218.992	1000 Orang	2.200.000.000	1000 Orang	2.200.000.000	1000 Orang	2.200.000.000	1000 Orang	2.200.000.000	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0007	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas	Sasaran : Penyandang Disabilitas	10 Orang	10 Orang	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang Disabilitas kewenangan Kabupaten/Kota,	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak															
		1. 06. 04 2 01 0008	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sasaran : Penyandang Disabilitas	141 Orang	141 Orang	44.195.800	141 Orang	45.195.800	141 Orang	46.195.800	141 Orang	47.195.800	141 Orang	47.195.800	141 Orang	48.195.800	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Sasaran : Penyandang Disabilitas	40 Orang	40 Orang	4.225.106,00	40 Orang	20.000.094	40 Orang	20.000.094	40 Orang	20.000.094	40 Orang	20.000.094	40 Orang	20.000.094	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota															

		1. 06. 04 2 01 0010	Pemberian layanan kedaruratan	Sasaran : Penyandang Disabilitas	10 Orang	10 Orang	4.244.425	10 Orang	4.500.000	10 Orang	4.600.000	10 Orang	4.700.000	10 Orang	4.800.000	10 Orang	4.900.000	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Sasaran : Penyandang Disabilitas	20 Orang	20 Orang	5.800.000	20 Orang	9.999.943	20 Orang	9.999.943	20 Orang	9.999.943	20 Orang	9.999.943	20 Orang	9.999.943	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0012	Pemberian Layanan Rujukan.	Sasaran : Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	370 Orang	370 Orang	153.586.333	370 Orang	370.349.103	370 Orang	370.349.103	370 Orang	370.349.103	370 Orang	370.349.103	370 Orang	370.349.103	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran: Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 04 2 01 0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	10 Orang	10 Orang	-	10 Orang	15.000.053	10 Orang	16.000.000	10 Orang	17.000.000	10 Orang	18.000.000	10 Orang	19.000.000	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota															

		1.06.05.2.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya	100%	100%	110.536.414	100%	175.094.346	100%	175.094.346	100%	175.094.346	100%	175.094.346	100%	175.094.346		
		1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	Sasaran : Anak-anak Terlantar	10 Orang	10 Orang	1.737.245	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-anak Terlantar	Sasaran : Anak-anak Terlantar	10 Orang	10 Orang	1.999.443	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	10 Orang	5.000.000	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran: Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1.06.05.2.01.0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Sasaran : Panti Asuhan dan Anak Terlantar	608 Orang	608 Orang	106.799.726	608 Orang	165.094.346	608 Orang	165.094.346	608 Orang	165.094.346	608 Orang	165.094.346	608 Orang	165.094.346	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota												100%			

		1 06 05 2 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Orang Miskin yang masuk dalam Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	321.516.726	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000	100%	1.350.000.000		
		1. 06. 05 2 02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau	150.000 Orang	150.000 Orng	186.978.450	150.000 Orng	450.000.000	150.000 Orng	450.000.000	150.000 Orng	450.000.000	150.000 Orng	450.000.000	150.000 Orng	450.000.000	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhihinya Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata															
		1. 06. 05 2 02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau	49.957 Keluarga	49.957 Keluarga	19.334.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhihinya Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Waktu Pelaksanaan															
		1. 06. 05 2 02 0003	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau	125.448 Keluarga	125.448 Keluarga	83.492.145,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%													
				Indikator Hasil : Terpenuhihinya Orang Miskin yang masuk dalam Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															
		1. 06. 05 2 02 0004	Facilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Sasaran : Penduduk Miskin dan KURBE Kab.Sanggau	100 Orang	100 Orang	31.711.240,60	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhihinya Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 05 2 02 0006	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau	-	-	-	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000	20 Orang	400.000.000	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhihinya Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 05 2 02 0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Penduduk Miskin Kab.Sanggau	-	-	-	1.000 Usulan	400.000.000	1.000 Usulan	400.000.000	1.000 Usulan	400.000.000	1.000 Usulan	400.000.000	1.000 Usulan	400.000.000	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Usulan Penindakdayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhihinya Jumlah Usulan Penindakdayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan															

		1. 06. '06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Tertangani dalam 1 (satu) Tahun	100%	100%	325.929.141	100%	399.046.491	100%	399.046.491	100%	399.046.491	100%	399.046.491	100%	399.046.491		
		1. 06. '06 2 '0001	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	325.929.141	100%	399.046.491	100%	399.046.491	100%	399.046.491	100%	399.046.491	100%	399.046.491	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
		1. 06. '06 2 '01 '0001	Penyediaan Makanan	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial	300 Orang	300 Orang	304.037.410	300 Orang	304.037.410	300 Orang	304.037.410	300 Orang	304.037.410	300 Orang	304.037.410	300 Orang	304.037.410		
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 06 2 01 0002	Penyediaan Sandang	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial	300 Orang	300 Orang	13.076.211	300 Orang	30.003.866	300 Orang	30.003.866	300 Orang	30.003.866	300 Orang	30.003.866	300 Orang	30.003.866	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 06 2 01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial	15 Unit	15 Unit	3.527.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%													
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 06 2 01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial	300 Orang	300 Orang	3.377.500	300 Orang	62.805.215	300 Orang	62.805.215	300 Orang	62.805.215	300 Orang	62.805.215	300 Orang	62.805.215	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota															



		1. 06. 06 2 01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Sasaran : Penerima Bantuan Bencana Alam / Sosial	300 Orang	300 Orang	1.910.600	300 Orang	2.200.000	300 Orang	2.200.000	300 Orang	2.200.000	300 Orang	2.200.000	300 Orang	2.200.000	Kabid Rehsos	DINSOSP3AKB
				Indikator Kehuaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota															
		1. 06. 07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Indikator Program : Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100%	100%	267.833.780	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kabid PSFM	DINSOSP3AKB
		1. 06. 07 2. 01	Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100%	100%	267.833.780	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
		1. 06. 07 2. 01 0002	Peneliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Sasaran : Taman Makam Pahlawan	3 TMP	3 TMP	267.833.780	3 TMP	200.000.000	3 TMP	200.000.000	3 TMP	200.000.000	3 TMP	200.000.000	3 TMP	200.000.000		
				Indikator Kehuaran :Jumlah Makam yang Terpenuhi Peneliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota												3 TMP	77.524.503		
				Indikator Hasil : Terpenuhi Jumlah Makam yang Terpenuhi Peneliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota															
Terwujudnya peningkatan Kualitas Gender				Indeks Pembangunan Gender (IDG)	74,00	74,00		74,50			75,00			75,50		76,00		Kadis DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
	Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,50	83,50		83,50			84,00			84,50		85,00		Kadis DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	690	701		730			760			801		801			
		2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	13,00 %	13,00 %	215.560.088	13,00 %	230.457.336	13,50 %	230.457.336	14,00%	230.457.336	14,50 %	230.457.336	15,00 %	335.900.211	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
		2 08 02 2 01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Presentase hasil perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan	100%	100%	51.871.832	100%	-	100%		100%		100%		100%	105.442.875		
		2 08 02 2 01 0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Sasaran : Dokumen APE	40 Orang	40 Orang	51.871.832	-	-							28 Perangkat Daerah	105.442.875	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Kehuaran :Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG															
				Indikator Hasil : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG															
		2 08 02 2 01 0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen APE	-	-	-	28 Lembaga	51.871.832	28 Lembaga	53.000.000	28 Lembaga	54.000.000	28 Lembaga	55.000.000	28 Lembaga	56.000.000	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Kehuaran :Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi lembaga pemerintah dan non pemerintah															
				Indikator Hasil : Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi lembaga pemerintah dan non pemerintah															



		2 08 02 2 02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase Kaum perempuan yang mendapatkan sosialisasi terkait Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	163.688.256	100%	230.457.336	100%	230.457.336	100%	230.457.336	100%	230.457.336	100%	230.457.336	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
		2 08 02 2 02 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus	1 Dok	1 Dok	48.459.588	-	-										
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											1 Dok	58.902.932	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB	
				Indikator Hasil: Tersusunnya Dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota															
		2 08 02 2 02 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus	2 Organisasi	2 Organisasi	115.228.668	-	-									Kabid Pemberdayaan Perempuan	
				Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota											2 Organisasi	140.061.166		DINSOSP3AKB	
				Indikator Hasil: Terpenuhiya Organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota															
		2 08 02 2 02 0005	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus	-	-	-	3 Lembaga	115.228.668	3 Lembaga	115.228.668	3 Lembaga	115.228.668	3 Lembaga	115.228.668	3 Lembaga	115.228.668	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi															
				Indikator Hasil: Terpenuhiya Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi															

		2 '08 '02 2 '02 '0008	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sasaran : Kaum Perempuan Desa Fokus	-	-	-	80 Orang	115.228.668	80 Orang	115.228.668	80 Orang	115.228.668	80 Orang	115.228.668	80 Orang	115.228.668	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi															
				Indikator Hasil: Terpenuhi Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi															
		2 '08 '02 2 '03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Indikator Kegiatan : Persentase Organisasi Perempuan yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	1.613.904.482	100%	1.098.791.210	100%	1.098.791.210	100%	1.098.791.210	100%	1.098.791.210	100%	1.098.791.210	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
		2 '08 '02 2 '03 '0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Organisasi Perempuan	31 Lembaga	31 Lembaga	1.488.639.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	100%	100%													
				Indikator Hasil : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan															
		2 '08 '02 2 '03 '0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Layanan Pemberdayaan Perempuan	200 Orang	200 Orang	38.692.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100%	100%													
				Indikator Hasil : Terpenuhi sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas															

		2 08 02 2 03 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu	1 Lap	1 Lap	86.572.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Hari Kartini dan Hari Ibu															
		2 08 02 2 03 0007	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu	-	-	-	31 Lembaga	946.096.260	31 Lembaga	946.096.260	31 Lembaga	946.096.260	31 Lembaga	946.096.260	31 Lembaga	946.096.260	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan															
		2 08 02 2 03 0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu	-	-	-	2 Dok	114.002.527	2 Dok	114.002.527	2 Dok	114.002.527	2 Dok	114.002.527	2 Dok	114.002.527	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan															

		2 08 02 2 03 0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen Pelaksanaan Hari Kartini dan Hari Ibu				1 Lap	38.692.423	1 Lap	38.692.423	1 Lap	38.692.423	1 Lap	38.692.423	1 Lap	38.692.423	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator keluaran : jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota															
		2 08 03	Program Perlindungan Perempuan	Indikator Kegiatan : Persentase Kasus Kekerasa terhadap Perempuan yang Tertangani	100%	100%	173.462.876	100%	257.327.351	100%	257.327.351	100%	257.327.351	100%	257.327.351	100%	292.905.345	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
		2 08 03 2 01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Ratio KDRT	0,0046	0,0046	113.119.561	0,0046	113.119.561	0,0046	113.119.561	0,0046	113.119.561	0,0046	113.119.561	0,0046	113.119.561	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
		2 08 03 2 01 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	113.119.561	-	-							-	-	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%													
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan															
		2 08 03 2 01 0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP dan TPO kepada pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan	-	-	-	6 Lembaga	113.119.561	6 Lembaga	113.119.561	6 Lembaga	113.119.561	6 Lembaga	113.119.561	6 Lembaga	113.119.561	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota															

		2 '08 '03 2 '02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan :Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	29.270.104	100%	144.207.790	100%	144.207.790	100%	144.207.790	100%	144.207.790	100%	179.785.784	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
		2 '08 '03 2 '02 '0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten /Kota	Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan	25 Orang	25 Orang	29.270.104	-	-							25 Orang	35.577.994		
				Indikator Kehuaran : Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan	100%	100%													
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapat layanan pengaduan															
		2 '08 '03 2 '02 '0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sasaran : Perempuan Korban Kasus Kekerasan	-	-	-	25 Orang	144.207.790	25 Orang	144.207.790	25 Orang	144.207.790	25 Orang	144.207.790	25 Orang	144.207.790	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB
				Indikator Kehuaran :Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhi nya Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota															
		2 '08 '03 2 '03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran :Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KIP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	31.073.211	100%	-	100%		100%		100%		100%	-	Kabid Pemberdayaan Perempuan	DINSOSP3AKB

		2 08 03 2 03 0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Perempuan dalam kondisi darurat	100 Orang	100 Orang	31.073.211	-	-										
				Indikator Keuaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik															
				Indikator Hasil Terpenuhiya Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik															
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indikator Keluaran : Peningkatan Kualitas Keluarga yang terpenuhi	100%	100%	219.816.665,00	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB	
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Persentase (%) Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga yang terpenuhi dalam 1	100%	100%	219.816.665,00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB	
		2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan	Sasaran : Keluarga dan Anak	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100.000.000,00	-	-										
				Indikator Keuaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik															
				Indikator Hasil Terpenuhiya Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan															
		2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Keluarga dan Anak	1 Dok	1 Dok	119.816.665	-	-										
				Indikator Keuaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil Terpenuhiya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan															



		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Persentase Sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun	100%	100%	-	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Lembaga Penyedia Layanan	-	-	-	10 Lembaga	200.000.000	10 Lembaga	200.000.000	10 Lembaga	200.000.000	10 Lembaga	200.000.000	10 Lembaga	200.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas															
				Indikator Hasil :Terpenuhinya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas															
		2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Lembaga Penyedia Layanan	-	-	-	2 Lembaga	200.000.000	2 Lembaga	200.000.000	2 Lembaga	200.000.000	2 Lembaga	200.000.000	2 Lembaga	200.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil :Terpenuhinya Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota															
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Keluaran : Persentase Sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga yang terpenuhi dalam satu tahun	100%	100%	52.080.728,00	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	350.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2 08 05 2 02 0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak Korban Kekerasan	-	-		25 Orang	200.000.000	25 Orang	200.000.000	25 Orang	200.000.000	25 Orang	200.000.000	25 Orang	200.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota															

		2 08 05 2 02 0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak Korban Kekerasan	-	-		70 Orang	100.000.000	70 Orang	100.000.000	70 Orang	100.000.000	70 Orang	100.000.000	70 Orang	100.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota															
		2 08 05 2 02 0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak Korban Kekerasan	-	-		40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	40 Orang	100.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota															
		2 08 05 2 02 0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak Korban Kekerasan	-	-		150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	150 Orang	100.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota															
		2 08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indikator Program : Persentase (%) Dokumen Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak yang terpilah yang terpenuhi.	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2 08 05 2 01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase (%) Dokumen Data Gender dan Anak yang terpilah yang terpenuhi	100%	100%	52.080.728	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2 08 05 2 01 0003	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen Data Gender dan Anak	2 Dok	2 Dok	52.080.728	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia															

		2 '08 '06	Program Pemenuhan Hak Anak	Indikator Program : Persentase (%) Dokumen Pemenuhan Hak Anak.	100%	100%	227.895.572	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	744.541.207	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2 '08 '06 2 '01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase (%) Peran Aktif Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000		
		2 '08 '06 2 '01 0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran ; Dokumen KLA	-	-	-	4 Lembaga	100.000.000	4 Lembaga	100.000.000	4 Lembaga	100.000.000	4 Lembaga	100.000.000	4 Lembaga	100.000.000		
				Indikator Keluaran : Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota															
		2 '08 '06 2 '02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase (%) Dokumen Hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.	100%	100%	227.895.572	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	100%	644.541.207	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2 '08 '06 2 '02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran ; Dokumen KLA	360 orang	360 orang	33.407.231	-	-							360 orang	33.407.231		
				Indikator Keluaran : Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak															

		2 08 06 2 02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Dokumen KLA	360 orang	360 orang	33.407.231	-	-							360 orang	33.407.231		
				Indikator Keluaran : Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak															
				Indikator Hasil : Terperuhnya lembaga penyedia layanan yang mendukung peringatan dalam pengembangan kualitas hidup anak															
		2 08 06 2 02 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak-anak Kab. Sanggau	360 orang	360 orang	105.081.110	-	-							360 orang	127.726.745	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Yang Dibina				-	-							360 orang	127.726.745		
				Indikator Hasil : TerperuhnyaJumlah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Yang Dibina				-											
		2 08 06 2 02 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak-anak Kab. Sanggau	360 orang	360 orang	56.000.000	-	-							-	-	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Yang Dibina															
				Indikator Hasil : TerperuhnyaJumlah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Yang Dibina															
		2 08 06 2 02 0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak-anak Kab. Sanggau	-	-	-	50 Orng	250.000.000	50 Orng	250.000.000	50 Orng	250.000.000	50 Orng	250.000.000	50 Orng	250.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : TerperuhnyaJumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek															
		2 08 06 2 02 0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Anak-anak Kab. Sanggau	-	-	-	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	Kabid Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : TerperuhnyaJumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota															



		2 08 07	Program Perlindungan Khusus Anak	Indikator Program : Persentase penyelesaian tindak kekerasan terhadap anak	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Kabid Perlindungan Anak dan KK	DINSOSP3AKB
		2 08 07 2 01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase (%) Dokumen Hasil kebijakan perlindungan khusus anak dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	62.821.980	-	-							1 Dok	76.036.509	Kasi Advokasi dan Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
		2 08 07 2 01 0005	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	1 Dok	1 Dok	16.268.366	-	-							1 Dok	76.036.509	Kasi Advokasi dan Perlindungan Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota															
		2 08 07 2 02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Persentase (%) AMPK yang mendapatkan layanan dalam 1 (satu) tahun	100%	100%		100%								25 Orang		Kasi Pemenuhan Hak Anak	DINSOSP3AKB
		2 08 07 2 02 0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Sasaran : Desa Layak Anak	25 Orang	25 Orang	64.211.453	-	-							25 Orang	145.000.000	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya AMPK yang mendapatkan layanan															
		2 08 07 2 02 0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	-	-	-	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota															
		2 08 07 2 02 0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	-	-	-	25 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	25 orang	200.000.000	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota															

		2 08 07 2 02 0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Sasaran : Desa Layak Anak	-	-	-	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	25 orang	30.000.000	Kasi Pemenuhan Hak Anak	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Terkendalanya Laju pengendalian Penduduk				Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,38	1,36		1,34								1,28		Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
	Meningkatnya Keberhasilan Ber KB	2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5,20%	5,20%		5,20%		5,60%		6,20%		6,20%		6,20%		Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 02 2 01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5,20%	5,20%		5,20%		5,60%									
		2 14 02 2 01 0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota.	Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait	1 Dok	1 Dok	16.149.672	-	-									Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.	100%	100%													
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Dokumen Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Koalisi Kependudukan yang Disusun															

		2 14 02 2 01 0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Sasaran : OPD Lintas Sektor Terkait	2 Dok	2 Dok	52.124.886											Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah Kabupaten/Kota Program Bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)	100%	100%	100%	-	-										
				Indikator Hasil : Tersedianya Dokumen GDPK yang disusun				-								-			
		2 14 02 2 01 0021	Kerjasama Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Sasaran : Sekolah															
				Indikator Keluaran : Jumlah Kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	14.357.772	-	-										
				Indikator Hasil : Terpuhinya Kerjasama pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal yang dilaksanakan	100%	100%		100%											
		2 14 02 2 01 0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sasaran : Sekolah				1 Dok	82.165.600	1 Dok	82.165.600	1 Dok	82.165.600	1 Dok	82.165.600	1 Dok	82.165.600	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota				100%	-	100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota															



		2 14 02 2 01 0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Sasaran : Sekolah				23 Satuan Pendidikan	12.345.000	23 Satuan Pendidikan	12.345.000	23 Satuan Pendidikan	12.345.000	23 Satuan Pendidikan	12.345.000	23 Satuan Pendidikan	12.345.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				-	-										
				Indikator Hasil : Terpenuhihnya Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal															
		2 14 02 2 01 0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Sasaran : Sekolah				2 Kab/Kota	12.345.000	2 Kab/Kota	12.345.000	2 Kab/Kota	12.345.000	2 Kab/Kota	12.345.000	2 Kab/Kota	12.345.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan				-	-										
				Indikator Hasil : Terpenuhihnya Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan															
		2 14 02 2 01	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		2 14 02 2 01 0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes	2 Laporan	2 Laporan	83.275.000	2 Laporan	83.275.000	2 Laporan	83.275.000	2 Laporan	83.275.000	2 Laporan	83.275.000	2 Laporan	83.275.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhihnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga															



		2 14 02 2 01 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes	1 Laporan	1 Laporan	101.400.000	1 Laporan	112.000.000	1 Laporan	101.400.000	1 Laporan	101.400.000	1 Laporan	101.400.000	1 Laporan	101.400.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tersusunnya Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga															
		2 14 02 2 01 0013	Pengolahan dan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes	2 Dok	2 Dok	113.000.000	2 Dok	114.000.000	2 Dok	114.000.000	2 Dok	114.000.000	2 Dok	114.000.000	2 Dok	114.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB															
		2 14 02 2 01 0015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Knapung untuk memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor lain.	Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes	2 Unit	2 Unit	4.000.000	-											
				Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Data Kependudukan di kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana) di sektor lain yang dibentuk	100%	100%		-											
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang dibina												100%			
		2 14 02 2 01 0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Sasaran : 15 Balai Penyuluh KB dan 33 Faskes	-	-	-	2 Unit	6.000.000	2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit			
				Indikator Keluaran :Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	-	-		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk												100%			

		2 14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Ratio Akseptor KB	32,83	32,83		32,83		32,83		32,83		32,83		32,83		Kabid Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSP3AKB
		2 14 03 2 01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	74,96	74,96	1.227.248.758	74,96		74,96		74,96		74,96		74,96		Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 03 2 01 0008	Pengendalian Program KKBPK	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja	-	-	-	2 Lap	120.000.000	2 Lap	120.000.000	2 Lap	120.000.000	2 Lap	120.000.000	2 Lap	120.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil pengendalian Program KKBPK	-	-		100%							100%				
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Laporan hasil pengendalian Program KKBPK															
		2 14 03 2 01 0010	Pengelolaan Operasional dan Saran di Balai Penyuluh Bangsa Kencana	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja	1 Laporan	1 Laporan	722.248.758	1 Laporan	722.248.758	1 Laporan	722.248.758	1 Laporan	722.248.758	1 Laporan	722.248.758	1 Laporan	722.248.758	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran :Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana).															

		2 14 03 2 01 0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja	1 Laporan	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	227.460.000	1 Laporan	227.460.000	1 Laporan	227.460.000	1 Laporan	227.460.000	1 Laporan	227.460.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpuhinya Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)															
		2 14 02 2 01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang.	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	155.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Tingkat Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang															

		2 14 03 2 01 0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Sasaran : Pasangan Usia Subur, Lintas Sektoral, Mitra kerja	45 Organisasi	45 Organisasi	160.000.000	45 Organisasi	200.000.000	45 Organisasi	200.000.000	45 Organisasi	200.000.000	45 Organisasi	200.000.000	45 Organisasi	200.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja															
		2 14 03 2 02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	521.250.000	100%	521.250.000	100%	521.250.000	100%	521.250.000	100%	521.250.000	100%	521.250.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 03 2 02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Sasaran : Kader PPKBD dan SUB PPKBD	15 Orang	15 Orang	461.250.000	15 Orang	461.250.000	15 Orang	461.250.000	15 Orang	461.250.000	15 Orang	461.250.000	15 Orang	461.250.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Kader yang mengikuti penggerakan kader Intitusi Masyarakat Pedesaan (IMP)															
		2 14 03 2 02 0007	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Sasaran : Kader PPKBD dan SUB PPKBD	1 Lap	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	1 Lap	60.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)															

		2 14 '03 2 '03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	100%	394.041.626	100%	575.410.000	100%	574.910.000	100%	574.910.000	100%	574.910.000	100%	574.910.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 '03 2 '03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.	Sasaran : 94.138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau	1 Laporan	1 Laporan	34.200.000	1 Laporan	52.500.000	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	52.000.000	1 Laporan	52.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.															
		2 14 '03 2 '03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAU+DAK)	Sasaran : 94.138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau	12.709 Akseptor	12.709 Akseptor	322.841.626	12.709 Akseptor	446.710.000	12.709 Akseptor	446.710.000	12.709 Akseptor	446.710.000	12.709 Akseptor	446.710.000	12.709 Akseptor	446.710.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)															
		2 14 '03 2 '03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Sasaran : 94.138 PUS Menjadi Peserta KB Baru dan Aktif di 15 kecamatan Kabupaten Sanggau	1 Laporan	1 Laporan	37.000.000	1 Laporan	76.200.000	1 Laporan	76.200.000	1 Laporan	76.200.000	1 Laporan	76.200.000	1 Laporan	76.200.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya															
		2 14 '03 2 '04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	100%	100%	148.084.712,20	100%	372.000.000,00	100%	372.000.000,00	100%	372.000.000,00	100%	372.000.000,00	100%	372.000.000,00	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 '03 2 '04 0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dan PUS (Pasangan Usia Subur)	3 Organisasi	3 Organisasi	42.484.712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB															

		2 14 '03 2 '04 '0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dn PUS (Pasangan Usia Subur)	8 Unit	8 Unit	44.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran :Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DINSOSP3AKB
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas															
		2 14 03 2 04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Sasaran : Lintas Sektoral, Mitra Kerja dan Masyarakat dn PUS (Pasangan Usia Subur)	169 Kampung	169 Kampung	61.600.000	169 Kampung	372.000.000	169 Kampung	372.000.000	169 Kampung	372.000.000	169 Kampung	372.000.000	169 Kampung	372.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		DINSOSP3AKB
				Indikator Hasil : TerpenuhiyaJumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)															
		2 14 04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indikator Program : Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)	71,04 %	71,04 %	2.718.433.204	71,04 %	3.028.600.000	71,04 %	3.028.600.000	71,04 %	3.028.600.000	71,04 %	3.028.600.000	71,04 %	3.028.600.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 04 2 01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator Kegiatan : Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang ada di setiap Kecamatan	100%	100%	137.833.204	100%	448.000.000	100%	448.000.000	100%	448.000.000	100%	448.000.000	100%	448.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 04 2 01 0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Sasaran : Kelompok Tribina	-	-	-	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	1 Laporan	48.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Indikator Hasil : Tingkat Pencapaian Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)															
		2 14 04 2 01 0017	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	Sasaran : kelompok Kegiatan Tribina	1 Laporan	1 Laporan	121.057.312	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran :Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				Indikator Hasil : Cakupan Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)												100%			



		2 14 04 2 01 0018	Pengadaan sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKJ, BKJ, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Sasaran : kelompok Kegiatan Tribina	-	-	-	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	20 Unit	200.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKJ, BKJ, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKJ, BKJ, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia															
		2 14 04 2 01 0028	Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita (BKJ), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan konseling remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga)>	Sasaran : Remaja dan Guru BK	5 Kelompok	5 Kelompok	16.775.892	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	50.000.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran :Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKJ), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk															
				Indikator Hasil : Terpenuhiya Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKJ), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk															
		2 14 04 2 02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indikator Kegiatan : Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber-KB mandiri	53,33%	53,33%	2.580.600.000	53,33%	2.580.600.000	53,33%	2.580.600.000	53,33%	2.580.600.000	53,33%	2.580.600.000	53,33%	2.580.600.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
		2 14 04 2 02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Biduta/ Balita)	Sasaran : Kader Tribina	391 Lap	391 Lap	2.580.600.000	391 Lap	2.580.600.000	391 Lap	2.580.600.000	391 Lap	2.580.600.000	391 Lap	2.580.600.000	391 Lap	2.580.600.000	Kabid Pengendalian Penduduk dan KB DINSOSP3AKB	DINSOSP3AKB
				Indikator Keuaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Biduta/ Balita) yang mendapat pendampingan															
				Indikator Hasil : Tingkat Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Biduta/ Balita) yang mendapat pendampingan															

Dari table 6.1 diatas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 15 (Lima Belas) program serta 36 (Lima Puluh Enam) kegiatan dan 114 Sub Kegiatan yang membidangi tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Dari semua program dan kegiatan tersebut telah mencakup tujuan dan sasaran yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang telah termasuk dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sanggau tahun 2025-2026.

Pembangunan pemberdayaan perempuan di kabupaten Sanggau diselenggarakan melalui berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak dan meningkatnya peran atau partisipasi perempuan dalam segala bidang, yaitu meliputi hukum, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya. Atas dasar ini, kebijakan terhadap masalah perempuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan agar mampu mengembangkan potensi dirinya, mengakses sumber daya ekonomi, dan mewujudkan jati dirinya serta kiprah dalam kegiatan pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 (tiga) program yaitu :
  - ✓ Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
  - ✓ Indikator Kinerja Program
    1. Persentase Jumlah Desa yang Memiliki Komitmen terhadap KLA
    2. Rasio KDRT
    3. Rasio Trafficking
  - ✓ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - ✓ Indikator Kinerja Program
    1. Persentase Penyelesaian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

- ✓ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- ✓ Indikator Kinerja Program

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan program ini adalah peningkatan SDM perempuan melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik.

Tolak ukur keberhasilan dari program ini adalah : terwujudnya peningkatan SDM perempuan dan persentase keterwakilan perempuan dibidang politik dan jabatan publik dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui peningkatan kapasitas lembaga dan penguatan peran lembaga pemberdayaan perempuan dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Peningkatan SDM pelayanan Pendamping korban KDRT
- b. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
- c. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan melalui :

- ✓ Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender dalam pembangunan

Tujuan dari program ini adalah pembinaan terhadap perempuan dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Pembinaan organisasi perempuan
- b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta Gender dalam kesetaraan Gender

- c. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- d. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
- e. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

✓ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuannya adalah Pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak.

Kegiatan pokok dari program ini adalah :

- a. Fasilitasi Hari Anak Nasional, Forum Anak Daerah dan pengembangan kreatifitas dan bakat anak Kab. Sanggau.
- b. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan
- c. Fasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak
- d. Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan Anak

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Umum urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 (Empat) Program.

Untuk Mewujudkan peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas didalam sistem Jaminan Kesehatan melalui :

✓ Program Keluarga Berencana

✓ Indikator Program

- 1. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi Peserta KB Aktif

Tujuan dari program ini adalah pepaduan kebijakan pelayanan KB yang merata, berkualitas, peningkatan pelayanan KB serta peningkatan Kapasitas PLKB dan Tenaga Medis dalam mendukung Penggerakan dan Penyuluhan KB.

✓ Program Kesehatan reproduksi Remaja

✓ Indikator Program

Tujuan program ini adalah : Mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku remaja dan orang tua tentang kesehatan reproduksi remaja.

✓ Program Pelayanan Kontrasepsi

✓ Indikator Program

1. Persentase Peserta KB MKJP

Tujuan Program ini adalah : Meningkatkan peran serta Akseptor yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yang berkualitas.

✓ Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri

✓ Indikator Program

Cakupan Kelompok Bina Keluarga yang dibina (%)

Tujuan Program ini adalah : Mewujudkan Keluarga yang Berkualitas dan Sejahtera.

3. Urusan Sosial

Kebijakan umum urusan sosial adalah :

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Tolak ukur dari program ini adalah meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melalui :

✓ Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya.

✓ Indikator dari Program ini adalah Persentase PMKS yang tertangani.

Program ini bertujuan mewujudkan pemberdayaan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin. Tolak ukur dari program ini adalah terwujudnya melalui peningkatan

pemberdayaan sosial, peningkatan pengembangan sumber potensi sumber kesejahteraan dan peningkatan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LKS) serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan.

- ✓ Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase PMKS yang ditangani  
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, ketahanan sosial khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat / relawan sosial.

Tolak ukur keberhasilan program ini adalah meningkatnya prosentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatan pokok dari kegiatan ini adalah rehabilitasi sosial yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum

- ✓ Program Pembinaan Penyandang Disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Trauma.
- ✓ Indikator Program ini adalah:
  1. Persentase Penyandang Disabilitas dan Trauma yang tertangani
  2. Persentase ODGJ yang ditangani

Kedua hal tersebut diatas lah yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program tersebut.

Tujuan dari program ini adalah penyediaan kebutuhan dasar bagi para penyandang Disabilitas serta orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan fasilitas pengantaran ke Rumah sakit Jiwa serta penjemputan kembali Orang dengan gangguan jiwa bila dinyatakan sudah sembuh oleh Tim Medis.

- ✓ Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo  
Tujuan dari program ini adalah terwujudnya pembinaan panti asuhan melalui kegiatan rehabilitasi dan operasional bagi panti asuhan.
- ✓ Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase Lembaga Kesejahteraan sosial yang di bina.

Tujuan dari program ini adalah peningkatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap lembaga pemberdayaan sosial, sehingga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

- ✓ Indikator dari program ini adalah Cakupan Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%)

Tujuan dari pogram ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, sehingga dapat memiliki kehidupan yang layak. Rumah tidak layak huni ini sendiri yang memiliki Prinsip Gotong royong, kerjasama serta asas kekeluargaan dalam prinsip Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

- ✓ Indikator dari program ini adalah Persentase pelestarian Taman Makam Nasional/Monumen Nilai Kepahlawanan.

Tujuan Kegiatan pokok dari program ini adalah pemeliharaan taman makam pahlawan nasional serta pengenalan nilai-nilai kepahwalanan serta kesetiakawanan sosial.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2030 adalah selama Lima tahun. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki 3 (tiga urusan) yaitu Urusan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk mencapai kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana memiliki indikator yang sangat mendukung untuk pencapaian target kinerja selama tahun 2025-2030.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini:





Tabel 7.1								
Indikator Kinerja DINSOSP3AKB yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD								
NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>							
1	Persentase Penduduk Miskin	4,17 %	3,67 %	3,17 %	2,67 %	2,17 %	1,67 %	1,67 %
2	Nilai AKIP DINSOSP3AKB	69,70	70,00	70,30	70,50	71,00	71,50	71,80
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,95	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	94,00
	<b>Sosial</b>							
6.1	Persentase PPKS yang di fasilitasi	98,90	98,92	98,94	98,96	98,96	99,00	99,00
6.3	Persentase PPKS yang tertangani	98,90	98,92	98,94	98,96	98,96	99,00	99,00
6.5	Persentase Bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
6.6	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	100	100	100	100	100	100	100
2	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0,32	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,44
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	10	10,50	11,02	11,57	12,15	12,75	13,38
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	54,67	56,31	67,99	59,73	61,52	63,36	65,26
2.4	Rasio KDRT	0,64	0,11	0,057	0,057	0,57	0,57	0,57
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur							
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	87,44	89,14	90,93	92,74	94,6	94,49	94,49
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	100

2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100	100	100
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	98,52	98,54	98,56	98,58	98,60	98,62	98,64
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	71,29	71,31	71,33	71,35	71,37	71,39	72,00
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	37,43	37,45	37,47	37,49	37,51	37,53	37,55
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi							
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,82	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,86
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian							
2.20	Indeks Pemberdayaan Gender	74	74,5	75	75,5	76	76,5	76,5
2.21	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	700	701	800	801	900	901	901
8	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70	1,60	1,50	1,40	1,20	1,00	1,00
8.2	Total Fertility Rate	2,21	2,18	2,16	2,14	2,12	2,10	2,10
8.3	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	35 %	55 %	65 %	75 %	85 %	95 %	95 %
8.4	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	20 %	35 %	50 %	60 %	70 %	80 %	80 %
8.5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	2	3	4	5	6	6

8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	25	35	45	55	65	75	75
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	2
8.9	Ratio Akseptor	67,00 %	68,00 %	69,00 %	70,00 %	71,00 %	72,00 %	72,00 %
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	66,80 %	65,00%	64,00%	63,00%	62,00 %	60,00%	60,00%
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	42,70 %	37,70%	32,70%	27,70%	22,70%	18,00%	18,00%
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,49%	0,39%	0,29%	0,19%	0,10%	0,00%	0,00%
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	10,00%	9,50%	9,00%	8,50%	8,00%	7,40%	7,40%
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	6,83%	12,00%	17,00%	23,00%	25,00%	28,40%	28,40%
8.15	Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	40,90%	45,00%	45,80%	48,00%	55,00%	60,00%	60,00%
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,55%	82,00%	85,00%	88,00%	91,00%	95,00%	95,00%
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	60,00%	62,00%	65,00%	68,00%	70,00%	73,00%	73,00%
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	15,17%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	40,00%
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	3	5	8	10	13	15	15
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	2.904	6.107	9.771	12.214	14.657	18.322	18.322
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	16	30	45	55	65	80	80
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	60,00%	62,00%	63,00%	64,00%	66,00%	68,00%	68,00%
8.24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	80,00 %	82,00 %	85,00 %	90,00 %	95,00 %	100 %	100 %
8.25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	9,47 %	18,93 %	28,40%	37,87 %	47,34 %	56,80%	56,80%
8.26	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)							
8.27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	60,00 %	65,00 %	70,00 %	75,00 %	80,00 %	85,00 %	85,00 %
8.28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	38,12%	40,00%	45,00 %	50,00 %	55,00 %	60,00%	60,00%
8.29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	6,30 %	10,00 %	15,00 %	20,00 %	25,00%	30,00 %	30,00 %

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINSOSP3AKB	SASARAN DINSOSP3AKB	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
				LAYANAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
				Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera									
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan												
		2.	Terkendalinya Laju Penduduk		2. 1 Laju Pertumbuhan Penduduk	1,32	1,70	1,60	1,50	1,40	1,20	1	1
			2.1 Meningkatkan Keberhasilan ber-KB	2.1 .1 Total Fertility Rate	2.23	2,21	2,18	2,16	2,14	2,12	2,10	2,10	2,10
				Sosial									
2.	Meningkatnya Kesejahteraan sosial PPKS												
		2..	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PPKS		2.1 .1 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	17,50	47,25	47,50	48,00	48,50	49,00	50,00	50,00
			2.1 Meningkatkan Kemandirian PPKS	2.1 .1 Persentase PPKS yang mandiri	25,00	26,50	27,00	27,50	28,00	28,50	29,50	29,50	29,50
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
3.	Meningkatnya Kualitas Gender												
		3.	Terwujudnya peningkatan Kualitas Gender		3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,50	83,50	84,00	84,50	85,00	85,50	85,50	85,50
			3.1 Meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender dan Anak	3.1 .1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,00	74,00	74,50	75,00	75,50	76,00	76,50	76,50	76,50
				3.2	Predikat Kabupaten /Kota Layak Anak (KLA)	700	701	800	801	900	901	901	901

4.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				1.		Nilai SAKIP	69,70	69,70	70,00	70,30	70,50	71,00	71,50	71,50	
		1.	Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		1.	1.	Nilai SAKIP	69,70	69,70	70,00	70,30	70,50	71,00	71,50	71,50	
				1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.	1.1	Nilai AKIP DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau	69,70	69,70	70,00	70,30	70,50	71,00	71,50	71,50
				1.2.	Meningkatnya kualitas layanan publik DINSOSP3AKB Kab.Sanggau	1.	2.1	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur	91,27%	91,27%	91,50	92,00	92,50	93,00	94,00	93,00%

Untuk dapat menghitung Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024, serta sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Table 7.3

Rumusan Indikator

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Urusan Sosial		
6.1	Persentase PPKS	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Tetangani} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Kab.Sanggau}}$
6.2	Persentase PPKS yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mandiri} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Kab.Sanggau}}$
6.3	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah Panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos} \times 100\%}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}$
6.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah RTLH yang direhabilitasi} \times 100\%}{\text{Jumlah RTLH selama satu tahun}}$
6.5	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun} \times 100 \%}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}}$
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak		
2.1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{1}{3} \times (ede 1) + X(ede 2) + 1 inc-dis$
2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{1}{3} [(1por + 1Dm + 1 Inc - -dis)]$
2.3.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi angkatan kerja perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah angkatan kerja perempuan}}$
2.4.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah} \times 100\%}{\text{Pekerja perempuan dilembaga pemerintah}}$

		Jumlah pekerja perempuan
2.5.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	$\frac{\text{Jumlah Kursi DPRD yang diduduki perempuan} \times 100\%}{\text{Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD}}$
2.6.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	$\frac{\text{Pekerja perempuan dilembaga swasta} \times 100\%}{\text{Jumlah pekerja perempuan}}$
2.7.	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT} \times 100\%}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$
2.8.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	$\frac{\text{APM-SD Perempuan} \times 100\%}{\text{APM-SD Laki-laki}}$
2.9.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	$\frac{\text{APM-SMP Perempuan} \times 100\%}{\text{APM-SD Laki-laki}}$
2.10.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	$\frac{\text{Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun} \times 100\%}{\text{Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18}}$
2.11.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 thn} \times 100\%}{\text{Jumlah anak laki-laki tingkat pendidikan tinggi usia 19-24 thn}}$
2.12.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	$\frac{\text{AMH 15-24 Perempuan}}{\text{AMH 15-24 laki-laki}}$
2.13.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	$\frac{\text{Banyaknya pekerja upahan perempuandisektor non pertanian} \times 100\%}{\text{Banyaknya pekerja upahan disektor non pertanian}}$
2.14.	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Predikat Kabupaten Layak Anak
2.16.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu} \times 100\%}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk keunit pelayanan terpadu}}$
2.17.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	$\frac{\text{Jumlah korban Ktp/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas maupun tatalaksana Ktp/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu}}$
2.18.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos} \times 100}{\text{Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos\%}}$
2.19.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak} \times 100\%}{\text{Jumlah perkara kekerasan terhadap}}$



		perempuan dan anak yang disidangkan
2.20.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	$\frac{\text{Jumlah korban mendapat pelayanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum}} \times 100\%$
2.21.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan}}{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT}} \times 100\%$
2.22.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	$\frac{\text{Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya}}{\text{jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial}} \times 100\%$
Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana		
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	$Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$
8.2	Total Fertility Rate	TFR = Angka Kelahiran total ASFR = Angka kelahiran menurut kelompok umur
8.3	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dikampung KB}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
8.4	Presentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyusun \& memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk}}{\text{Jumlah semua perangkat daerah}} \times 100\%$
8.5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah perda atau perkada tentang pengendalian penduduk
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah Sektor
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	$\frac{\text{Jumlah anak}}{\text{Jumlah keluarga}} \times 100\%$
8.9	Ratio Akseptor	$\frac{\text{Jumlah Akseptor KB}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	$\frac{\text{Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19}}{\text{Jumlah kelompok perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama}} \times 100\%$
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur	$\frac{\text{Jumlah pasangan usia subur dengan istri}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$

	(PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	$\frac{\text{diumur kurang 20 thn}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
8.15	Persentas tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah PUS yang tidak lagi menggunakan Kontrasepsi}}{\text{Jumlah Akseptor KB}} \times 100\%$
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKB}} \times 100\%$
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKR}} \times 100\%$
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	$\frac{\text{Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB}}{\text{Jumlah anggota kelompok BKL}} \times 100\%$
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah PPKS}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	$\frac{\text{Jumlah PIKR/M}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100\%$
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	$\frac{\text{Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan}}{\text{Jumlah PKB/PLKB}} \times 100\%$
8.22	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa}}{\text{Jumlah Desa/kelurahan}} \times 100\%$
8.23	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah alkon premix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang alkon}}{\text{Perkiraan permintaan masyarakat}} \times 100\%$
8.24	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\frac{\text{Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS}}{\text{Jumlah faskes dan jejaring}} \times 100\%$
8.25	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	$\frac{\text{Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga}} \times 100\%$
8.27	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	$\frac{\text{Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga}}{\text{Jumlah kelompok kegiatan}} \times 100\%$
8.28	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	$\frac{\text{Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang}}{\text{Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak}} \times 100\%$
8.29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana	$\frac{\text{Jumlah anggaran untuk urusan PPKB}}{100\%}$

	dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Jumlah APBD dan APBDes
--	--	------------------------

(Sumber : Permendagri 86 tahun 2017)

Dari rumusan indikator di atas sesuai Permendagri 86 tahun 2017, maka didapatlah hasil indikator guna mencapai target Rencana Strategis Dinas sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2025--2026.

Untuk pencapaian target Rencana Stratetgis tersebut, maka dibagi menjadi tiga urusan yaitu Urusan Sosial, Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta pencapaian target indikator tersebut telah terakomodir pada program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana selama tahun 2025-2030, jika pada tahun berjalan ternyata program dan kegiatan tersebut tidak mampu mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengatur strategi sehingga dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau selama kurun waktu 2025-2030.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Masa berlaku Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Tahun 2025 – 2030 adalah selama dua tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2025 – 2030 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RPD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2030.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau tahun 2025 – 2030 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.